

Laporan Penelitian

# Analisis Rantai Nilai Usaha Kakao sebagai Produk Unggulan Kabupaten Ende-NTT



FORDFOUNDATION





## Laporan Penelitian

# Analisis Rantai Nilai Usaha Kakao sebagai Produk Unggulan Kabupaten Ende-NTT

### TIM PENELITI

---

*Principal Investigator:* Robert Endi Jaweng

*Koordinator Peneliti:* Boedi Rheza

*Peneliti:* Nur Azizah Febryanti

H. Nurcahyadi Suparman

*Mitra Peneliti Lokal*

*(Universitas Flores):* Avianita Rachmawati

Mansur Abdul Hamid



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Jakarta, April 2016



# Daftar Isi

Tim Peneliti .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar dan Grafik .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
1. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Signifikansi Penelitian .....	3
2. Tinjauan Pustaka .....	5
2.1 Tinjauan Pustaka .....	5
2.1.1 Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) .....	5
2.1.2 Agribisnis dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) .....	7
2.1.3 Produk Unggulan Daerah (PUD) .....	8
2.1.4 Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah .....	9
2.1.5 Analisis Rantai Nilai ( <i>Value Chain Analysis, VCA</i> ) .....	11
2.2 Kerangka Berpikir .....	12
3. Metodologi Studi .....	15
3.1 Pendekatan Studi .....	15
3.2 Batasan Penelitian .....	15
3.3 Lokasi Studi .....	15
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	15
3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden .....	15
3.6 Metode Analisis .....	16
4. Gambaran Umum Usaha Kakao di Kabupaten Ende .....	17
4.1 Kakao sebagai Produk Unggulan .....	17

4.2	Profil Perkebunan Kakao di Kabupaten Ende .....	20
4.2.1	Kandungan Mutu Kakao Ende .....	20
4.2.1.1	Kadar Air Kakao .....	20
4.2.1.2	Kadar Lemak Kakao .....	20
4.2.2	Perkebunan Kakao Ende .....	21
5.	Analisis Rantai Nilai Kakao Ende .....	23
5.1	Identifikasi Rantai Nilai .....	23
5.1.1	Rantai Nilai Input (Sarana Produksi/Saprodi) .....	23
5.1.2	Rantai Nilai Budidaya (Farming) .....	23
5.1.3	Rantai Pengolahan Hasil .....	25
5.1.4	Rantai Nilai Pemasaran .....	27
5.2	Stakeholder dan Peranannya dalam Rantai Nilai Usaha Kakao .....	29
5.2.1	Petani Kakao .....	29
5.2.2	Kelompok Tani (Poktan) .....	30
5.2.3	Pemerintah Daerah .....	30
5.2.4	Pedagang dan Perusahaan .....	31
5.2.5	Lembaga Keuangan Bank .....	31
5.2.6	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .....	31
5.2.7	Eksportir .....	31
5.2.8	Koperasi .....	32
5.2.9	Universitas .....	32
5.2.10	Lembaga Adat/ Mosalaki .....	32
5.3	Kebermasalahan Pengembangan Kakao .....	32
5.4	Identifikasi Faktor Internal Usaha Kakao .....	38
5.4.1	Ketersediaan Tenaga Kerja Keluarga (SDM) .....	38
5.4.2	Penguasaan Lahan Usaha .....	40
5.4.3	Penguasaan Modal Usaha .....	40
5.4.4	Sarana Produksi (Saprodi) .....	40
5.4.5	Pemasaran .....	43
5.4.6	Kelembagaan Sosial dan Budaya .....	43
5.4.7	Kelembagaan Ekonomi .....	44
5.5	Identifikasi Faktor Eksternal Usaha Kakao .....	44
5.5.1	Akses Permodalan .....	44
5.5.2	Kebijakan Pemerintah Daerah .....	45

5.5.3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .....	45
5.5.4	Infrastruktur .....	46
5.5.5	Kondisi Pasar .....	46
5.6	Regulasi Terkait Usaha Kakao .....	47
5.7	Analisis Strategi Pengembangan Kakao .....	54
6.	Penutup .....	61
6.1	Kesimpulan .....	61
6.2	Usulan Tindak Lanjut .....	62
	Daftar Pustaka .....	63





# Daftar Gambar dan Grafik

Gambar 2.1	Sistem Agribisnis di Indonesia (Baga, 2003) .....	8
Gambar 2.2	Konsep Rantai Nilai .....	11
Gambar 2.3	Kerangka Berpikir .....	12
Gambar 5.1	Model Distribusi Kakao di Kabupaten Ende .....	27
Gambar 5.2	Rantai Nilai Kakao di Kabupaten Ende .....	28
Gambar 5.3	Peta Stakeholder Kakao di Ende .....	33
Gambar 5.4	Permasalahan Usaha Kakao di Kabupaten Ende .....	39
Grafik 5.1	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Ton) .....	48
Grafik 5.2	Kondisi Ekspor Kakao Indonesia (Ton) .....	54



# Daftar Tabel

Tabel 4.1	Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Ende 2013/2014 .....	18
Tabel 4.2	Peran Komoditas Kakao dalam Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja Wilayah .....	19
Tabel 4.3	Luas Areal dan Produktivitas Komoditi Kakao Per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2014 .....	22
Tabel 5.1	Matriks Peran Stakeholders .....	33
Tabel 5.2	Klasifikasi Petani .....	41
Tabel 5.3	Syarat IUP-B dan IUP-P .....	50
Tabel 5.4	Fakta dan Masalah Kakao di Ende .....	55



# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Sistem desentralisasi dan otonomi daerah memberi ruang diskresi yang relatif besar bagi upaya optimalisasi potensi unggulan daerah sebagai strategi pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Strategi tersebut telah menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah yang tereksplisit dalam Permendagri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Permendagri ini juga memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merancang kebijakan dan kelembagaan yang relevan guna mendukung optimalisasi sektor unggulan daerah. Dengan demikian, Pemda diharapkan memiliki prioritas potensi unggulan yang dituangkan dalam arah kebijakan, perencanaan, penganggaran hingga level programatik dalam membangun ekonomi daerah.

Dari sisi pilihan potensi unggulan, sebagai negara agraris pada umumnya daerah-daerah di Indonesia menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan. Beberapa komoditas yang termasuk dalam sektor pertanian adalah kakao, kelapa, kopi, mente, dan kemiri. Komoditi-komoditi tersebut memiliki pasar baik domestik maupun luar negeri, seperti Eropa dan Amerika. Pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan merupakan salah satu usaha pertanian yang dikenal dengan Agribisnis. Kegiatan agribisnis yang dilakukan lebih berorientasi pada peningkatan daya saing dan pengembangan usaha ekonomi rakyat yang berkelanjutan, serta menjadi strategi pembangunan dalam kerangka otonomi daerah. Pengembangan agribisnis tidak hanya terbatas pada tahapan budidaya,

tetapi harus memperhatikan setiap mata rantai nilai dari usaha pertanian yaitu aspek input sarana/prasarana, pengolahan hasil sampai pada perdagangan dan distribusi.

Salah satu komoditas unggulan yang banyak diusahakan di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur adalah Kakao. Kakao pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1960 dan menjadi komoditas utama sejak tahun 1961. Pemerintah mulai merespon dan mendukung industri kakao pada tahun 1975, yaitu setelah PTP VI berhasil meningkatkan produksi tanaman ini melalui penggunaan bibit unggul *Upper Amazon Interconal Hybrid* (Sunantot, 1992). Menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO), Indonesia merupakan produsen kakao nomor tiga di dunia dengan produksi sebesar 809.583 ton dan menyumbang devisa terbesar di sektor perkebunan sebesar US \$ 1.4 Milyar pada tahun 2009 setelah komoditas kelapa sawit dan karet. Selama tahun 1998 hingga 2011, luas areal perkebunan kakao tercatat mengalami peningkatan sebesar 9 % per tahun dimana dari 1.746 juta hektar luas areal perkebunan kakao, 94 % dikelola oleh rakyat, 3.1% dikelola pemerintah dan 2,9 % oleh perkebunan besar swasta (Ditjebun, 2012).

Kakao merupakan produk unggulan, tetapi belum ada kebijakan dan program konkret dalam pengembangan usaha pertanian kakao. Selama ini belum ada intervensi khusus baik berupa program, anggaran maupun regulasi guna mengakselerasi perkembangan usaha agribisnis kakao di daerah. Kegiatan usaha kakao dibiarkan tumbuh sendiri tanpa dukungan yang signifikan dari Pemda.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satu daerah yang memiliki pertanian sebagai penyokong ekonomi terbesar adalah Kabupaten Ende. *Share* sektor pertanian terhadap perekonomian Ende pada tahun 2014 mencapai 27% (RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019). Beberapa komoditas pertanian juga dijadikan produk unggulan seperti kakao, mente, kelapa, kemiri. Dari berbagai pertimbangan, seperti keterlibatan masyarakat dan mata pencaharian masyarakat, harga yang baik, ketersediaan pasar, maka yang layak dijadikan produk unggulan di Kabupaten Ende adalah Kakao.

Produktivitas kakao di Kabupaten Ende terus menunjukkan peningkatan dimana, tahun 2014 hampir mencapai 1000 kg/ha. Selain itu, luas lahan pertanian kakao juga menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2013 sebesar 7772 Ha dan tahun 2014 sebesar 7943 Ha serta jumlah tenaga kerja yang berkecimpung dalam usaha kakao mencapai 10.300 KK. Oleh karena itu, perkembangan usaha kakao ini baik secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap ekonomi kerakyatan. Dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, kakao disebut sebagai salah satu produk unggulan dan menjadi isu strategis di Kabupaten Ende.

Kondisi tata niaga kakao di Ende sendiri di dominasi oleh pedagang, terutama pedagang kaki tiga. Belum banyak petani yang memainkan peran sebagai pedagang dalam rantai perdagangan kakao di Ende. Tingkat harga yang digunakan dalam perdagangan kakao di Ende mengacu pada tingkat harga yang ditetapkan oleh kedua pasar besar komoditas kakao, yaitu bursa komoditi di *New York* dan *London*. Sementara di tingkat petani, harga cenderung bergantung pada sisi permintaan pasar, pedagang cenderung mengambil biji kakao yang masih diproses asalan dari petani, untuk kemudian diproses kembali dalam bentuk fermentasi ataupun pengeringan untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. Umumnya

prosesor menginginkan kualitas fermentasi ataupun pengeringan yang lebih baik.

Posisi petani dalam rantai perdagangan kakao di Ende juga tidak terlalu kuat. Sebagai pihak yang melakukan budidaya, petani cenderung mendapatkan harga yang tidak baik. Hal ini dikarenakan sifat petani lebih sebagai penerima harga (*price taker*) dalam rantai perdagangan kakao. Penyebabnya adalah ketidakmampuan dan kurangnya motivasi petani dalam melakukan perawatan kebun, dan rendahnya produktivitas petani.

Berdasarkan berbagai kondisi di atas, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan sebuah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dari potensi unggulan di daerah (*need assessment*). Hasil penelitian nantinya akan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemda untuk membuat kebijakan maupun para pelaku (*Stakeholders*) di Kabupaten Ende.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana gambaran umum usaha kakao di Kabupaten Ende?
- 2) Bagaimana permasalahan setiap rantai nilai usaha kakao di Kabupaten Ende?
- 3) Bagaimana rencana tindak lanjut pengembangan kakao di Kab. Ende?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan gambaran umum usaha kakao di Kabupaten Ende.
- 2) Menganalisis permasalahan yang terjadi pada setiap rantai nilai kakao di Kabupaten Ende.
- 3) Merumuskan rencana tindak

lanjut atau intervensi untuk setiap permasalahan di tiap mata rantai nilai dan pengembangan iklim usaha kakao di Kabupaten Ende.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Menyediakan informasi mengenai permasalahan dan analisis *stakeholder* di setiap rantai nilai kakao sebagai produk unggulan di Kabupaten Ende.
- 2) Menjadi masukan kebijakan yang memadai untuk meningkatkan iklim usaha dan mengembangkan kakao sebagai produk unggulan di Kab. Ende.
- 3) Membantu mengidentifikasi titik-titik penting bagi penguatan kapasitas Pemda dalam kerangka pengembangan iklim usaha khususnya peningkatan agribisnis produk unggulan.

#### 1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ende untuk memperoleh profil kebermasalahan dan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan produk unggulan.
- 2) Pemerintah Pusat untuk memperoleh masukan bagi kebijakan pengembangan produk unggulan di daerah, khususnya pada tataran implementasi.
- 3) Investor untuk memperoleh gambaran mengenai usaha agribisnis kakao di Ende dan menambah referensi bagi mereka dalam berinvestasi di kabupaten Ende.
- 4) KPPOD sebagai bahan dasar dalam advokasi kebijakan, baik di level pusat maupun Pemda terkait. Penelitian ini juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lanjutan yang utamanya menuju kepada intervensi perbaikan kebijakan dan kelembagaan Pemda untuk pengembangan produk unggulan daerah. ■





## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Indonesia, sebagai Negara yang besar, memiliki daerah-daerah yang berkarakteristik unik dan beragam. Sebagian besar daerah-daerah ini memiliki keunggulan di bidang agraris atau pertanian. Sektor pertanian pun menjadi tulang punggung perekonomian daerahnya. Namun, kebijakan-kebijakan Pemda belum banyak yang berfokus ataupun mengoptimalkan sektor pertanian.

Pengembangan potensi unggulan memerlukan beberapa strategi. Hal penting yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi keunggulan dari satu daerah ataupun potensi unggulan apa yang ada di daerah. Dengan identifikasi yang tepat, daerah diharapkan dapat fokus pada potensi yang menjadi unggulannya, tidak lagi berfokus pada banyak potensi sehingga daerah dapat mengoptimalkan kebijakannya, termasuk di bidang fiskal. Kebijakan pengembangan potensi yang terfokus ini diharapkan memunculkan produk-produk unggulan di setiap daerah.

Strategi selanjutnya dalam pengembangan potensi unggulan adalah membuat perencanaan yang komprehensif dengan fokus pada Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Perencanaan ini diperlukan agar pengembangan potensi unggulan di daerah dapat memiliki tahapan-tahapan yang jelas. Perencanaan tidak hanya fokus pada potensi unggulan, tetapi juga perencanaan atas interaksi dari para *key actor* seperti dunia usaha, pemerintah daerah dan masyarakat umum di dalam satu bentuk kemitraan, sehingga akan tercipta pola kerjasama untuk pengembangan ekonomi lokal.

### 2.1.1 Pengembangan Ekonomi Lokal

Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah. Dilaksanakannya otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan berbagai strategi salah satunya adalah peningkatan ekonomi daerah. Peningkatan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan melakukan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). PEL dapat difokuskan kepada sektor-sektor unggulan di daerah seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya. Sebagai pengampu kewenangan, Pemda perlu merumuskan strategi untuk melaksanakan PEL. PEL mengacu pada proses di mana pemerintah lokal atau organisasi berbasis masyarakat berusaha menggerakkan dan memelihara aktivitas bisnis dan/atau kesempatan kerja. Tujuan utama PEL adalah merangsang kesempatan kerja lokal pada sektor tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). PEL berorientasi pada proses yaitu, pengembangan institusi yang baru, industri alternatif, memperbaiki kapasitas tenaga kerja, identifikasi pasar baru, transfer pengetahuan (*knowledge*) dan memelihara perusahaan dan usaha yang baru (Blakely, 1994). Dari definisi di atas, terdapat setidaknya dua poin penting dalam PEL, yaitu: tujuan yang utama dari PEL khususnya penggunaan sumber daya, baik SDM maupun SDA, serta proses untuk PEL khususnya kemitraan.

Proses PEL merupakan proses yang menekankan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder, termasuk juga dunia

usaha dan masyarakat. *International Labour Organization* (ILO) menyatakan bahwa PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah serta masyarakat pada wilayah tertentu yang memungkinkan kerjasama dalam menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya lokal dan keunggulan kompetitif. Proses partisipatif yang mendorong terciptanya kemitraan antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah pada tataran kemitraan PEL. Kemitraan ini merupakan kemitraan yang setara diantara masyarakat, dunia usaha dan Pemda. PEL memandang masyarakat tidak hanya sebagai *stakeholder* namun juga *shareholder*. *Shareholder* berarti bahwa adanya kepemilikan atau *buy in* dari pihak yang terlibat terhadap kemitraan yang dibangun.

PEL mencoba untuk merumuskan kembali strategi pembangunan ekonomi rakyat yang relatif terabaikan. Pembangunan ini menekankan pembangunan masyarakat yang seimbang, setara, berlanjut dan bersifat menyeluruh (*holistic*) melalui kemitraan antara institusi masyarakat lokal, LSM, Pemerintah dan sektor swasta. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah seperti memperkuat organisasi masyarakat lokal, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja luar pertanian, memperkuat pasar keuangan perdesaan dan memperbaiki manajemen pengelolaan sumber daya alam (Achjar, 2003). Dengan adanya kemitraan maka dapat dirumuskan satu strategi komprehensif untuk PEL.

Alizar (2002) menekankan bahwa dalam implementasinya, PEL perlu diwujudkan dalam kemitraan, atau disebut dengan istilah KPEL (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal). Kemitraan menjadi penting dan mendasar dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya suatu daerah, mengingat pemerintah sendiri memiliki keterbatasan (terutama

dana) sehingga memerlukan kontribusi sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan. Sekaligus, kemitraan dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengurangi dominasi sektor tertentu dalam proses perencanaan kebijakan terpadu. Dalam upaya meningkatkan akselerasinya, KPEL dilandasi oleh dua strategi. Pertama, strategi “klaster ekonomi” untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pendapatan (*livelihood*). Kondisi ini dapat dicapai melalui identifikasi peluang dan pengembangan pasar, diversifikasi, dan pemasaran berbagai komoditas terpilih (unggulan). Kedua, strategi “forum kemitraan” dalam rangka menggelar dialog partisipatif antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang pengembangan ekonomi. Melalui forum kemitraan, hal-hal yang terkait dengan kegiatan perencanaan, perumusan kebijakan, fasilitasi pelayanan, dan formulasi keputusan dibuat dan didiskusikan.

Kesuksesan kemitraan antar *stakeholder* di dalam PEL akan berdampak pada terciptanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan PEL, mobilisasi sumberdaya lokal dan energi, dan membuka ruang partisipasi untuk masyarakat di daerah. Agar kesuksesan kemitraan tersebut tercapai, terdapat beberapa kriteria kritis diantaranya:

- 1) Dukungan kuat dari masyarakat. Pengusaha individu harus dipersiapkan untuk terlibat di dalam pemecahan masalah.
- 2) Peran yang terlegitimasi dan diakui untuk setiap aktor. Setiap aktor harus memiliki ide yang jelas atas manfaat yang akan diperoleh dari bentuk kerjasama ini. Tidak boleh ada aktor yang lebih dominan dibanding yang lain.
- 3) Kemitraan yang berorientasi pada hasil. Para aktor yang terlibat harus memiliki tujuan yang jelas. Mereka harus meyatukan sumberdaya di ‘satu tempat’, menerima kepemimpinan yang jelas dan menciptakan struktur yang

fungsional.

- 4) Derajat otonomi untuk kemitraan, terlepas dari elemen funding public mereka. Seringkali kemitraan mengadopsi bentuk "entitas yang terpisah", organisasi nirlaba dengan pengelolaan perusahaan swasta yang professional.
- 5) Sistem komunikasi yang permanen di antara para rekan di dalam kemitraan.
- 6) Jaringan dari individu yang berkomitmen, tidak hanya jejaring organisasi.

Keseluruhan kriteria ini akan menjamin kesuksesan jika diterjemahkan secara efektif ke dalam struktur kerja yang dipengaruhi oleh kondisi daerah. Kemitraan yang sukses bukanlah kemitraan yang paling inklusif, namun kemitraan yang sukses adalah kemitraan yang berdasar pada mitra inti yang strategis dan yang menawarkan atau memiliki sumberdaya strategis yang besar. Secara keseluruhan, tidak ada satu bentuk kemitraan yang baku. Model kemitraan yang tepat di suatu daerah akan tergantung pada karakteristik kebermasalahan, budaya, politik dan pengalaman.

### 2.1.2 Agribisnis dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

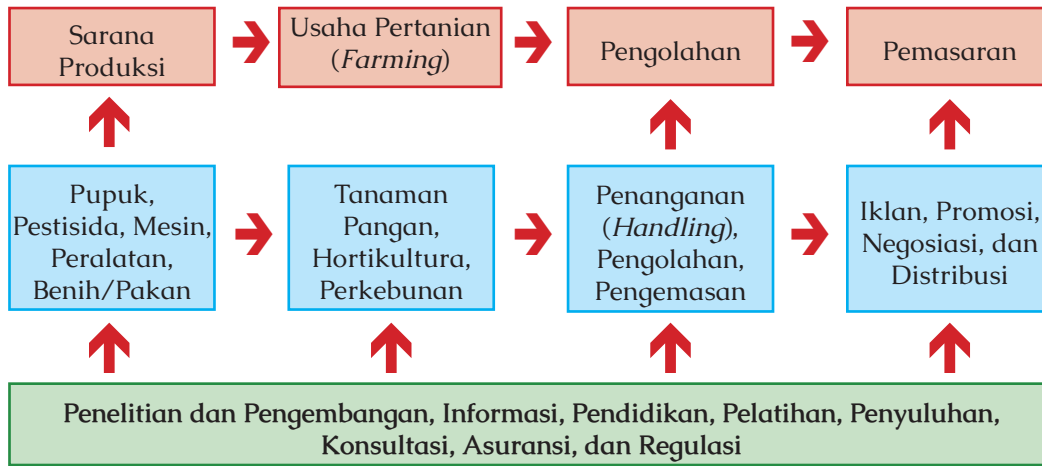
Sektor pertanian memiliki peluang untuk menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Pengelolaan sektor pertanian menjadi lebih berorientasi bisnis (Agribisnis) dapat membuat sektor tersebut lebih berdaya saing. Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem hulu, usahatani, hilir, dan penunjang. Menurut Saragih (1998, dalam Pasaribu [1999]), batasan agribisnis adalah sistem yang utuh dan saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir, subsistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan pertanian.

Agribisnis diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan: (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran. Sebagai sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut. Sedangkan kegiatan agribisnis melingkupi sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, serta bagian dari sektor industri. Sektor pertanian dan perpaduan antara kedua sektor inilah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional (Gunawan Sumodiningrat, 2000).

Baga (2003, dalam KPPOD [2012]) menggambarkan lebih detil lagi tentang sistem agribisnis di Indonesia. Secara umum sistem agribisnis mencakup subsistem mulai dari pemasok sarana produksi, usaha pertanian (*farming*), pengolahan, hingga pemasaran. Untuk menunjang eksistensi subsistem agribisnis, diperlukan dukungan penelitian dan pengembangan, informasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, konsultasi, asuransi, dan regulasi. Penelitian sangat penting agar permasalahan-permasalahan, terutama pada subsistem usaha pertanian dapat teratasi. Selain itu, dapat dilakukan peningkatan level teknologi dalam subsistem usaha pertanian. Hal yang sama juga terjadi pada pengolahan maupun pemasaran. Sehingga nantinya, setiap subsistem usaha pertanian dapat lebih efisien dan meningkatkan nilai tambah.

Setiap subsistem tersebut memiliki lembaga yang berperan dalam mendukung fungsi subsistem itu sendiri dan saling melakukan kerjasama. Terdapat sebuah lembaga lagi yang perannya mendorong seluruh fungsi subsistem yaitu lembaga pendukung (Departemen Pertanian, 2009). Kelembagaan penting dalam sistem pertanian tersebut adalah kelembagaan petani.

Gambar 2.1 Sistem Agribisnis di Indonesia (Baga, 2003)



Lembaga petani sebagai salah satu lembaga yang berada dalam setiap subsistem tersebut diawali dengan terjadinya kerjasama antar petani yang sebenarnya sudah menjadi budaya khususnya pada usaha tani komoditas tanaman pangan. Setiap lembaga petani tersebut memiliki tugas dan fungsinya (peran) masing-masing. Tetapi dalam menjalankan peran terhadap sistem pertanian (agribisnis), lembaga petani memiliki perbedaan tingkat kemampuan atau kinerja yang berbeda-beda.

Fungsi kelembagaan petani seperti yang tercantum dalam Permentan nomor 273/Kpts /OT.160/4/2007, yaitu sebagai penyedia informasi dan penyedia jasa/fisik bagi masing-masing subsistem agribisnis. Kedua fungsi tersebut sangat dibutuhkan oleh petani dalam mengembangkan agribisnis. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dari lembaga petani tersebut, perlu adanya struktur kelembagaan petani yang kuat dan mampu melaksanakan fungsi tersebut. Sehingga dibutuhkan personil dengan kemampuan dan kompetensi yang sesuai untuk mengisi struktur kelembagaan petani.

Agribisnis juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut antara lain: Ketersediaan tenaga

kerja/Sumber Daya Manusia; Penguasaan lahan usaha; Penguasaan modal usaha; produksi; pemasaran; kelembagaan sosial; dan kelembagaan ekonomi. Faktor eksternal antara lain kepadudukan; kondisi sarana dan prasarana; kondisi ekonomi; akses ke sumber modal; posisi tawar petani; introduksi teknologi; pembinaan oleh petugas; perusahaan mitra; kebijakan otonomi daerah; liberalisasi ekonomi (KPPOD, 2013).

### 2.1.3 Produk Unggulan Daerah (PUD)

Era globalisasi saat ini setidaknya telah membuat interaksi antar bangsa semakin intensif, khususnya dibidang perekonomian. Setiap Negara telah mencoba mengembangkan produk unggulannya agar dapat bersaing di pasar global yang semakin terbuka. Produk unggulan di suatu Negara akan muncul jika dilakukan penataan yang tepat, termasuk di dalamnya strategi pengembangan. Strategi pengembangan ini dapat dimulai dengan meletakkan konsep dasar mengenai produk unggulan itu sendiri.

Salah satu konsep yang diusung dalam pengembangan produk unggulan adalah *One Village One Product (OVOP)* atau Satu Desa Satu Produk. Desain konsep ini mensyaratkan satu daerah/ desa harus

memiliki satu produk unggulan yang memiliki keunikan/ciri khas, memiliki nilai tambah serta potensial untuk dapat dikembangkan. Sumber daya untuk memproduksi produk tersebut harus berasal dari desa itu sendiri. Konsep OVOP diharapkan mampu meningkatkan kinerja, ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya masyarakat pedesaan. Konsep OVOP ini pertama kali diperkenalkan di *Prefecture Oita* pada Tahun 1979, dan saat ini sudah banyak direplikasi di banyak Negara dan terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan dan mengurangi kemiskinan.

Di Indonesia, konsep OVOP sudah dicetuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui terbitnya Permenperin No.78 tahun 2007. Di Indonesia, Prinsip OVOP menekankan pada dimensi dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi dan konsumsi. Konsep ini berusaha menghadirkan komunitas mandiri yang mampu menciptakan produk unggulan tanpa bantuan pembiayaan dari pemerintah. Produk yang dipilih untuk dikembangkan melalui konsep OVOP harus memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini:

- 1) Produk unggulan yang dikembangkan adalah produk unggulan daerah atau produk kompetensi inti daerah;
- 2) Memiliki keunikan khas budaya dan keaslian lokal;
- 3) Bermutu dan berpenampilan baik;
- 4) Berpotensi pasar domestik dan internasional;
- 5) Diproduksi secara kontinyu dan konsisten.

Kriteria-kriteria di atas, jelas menunjukkan bahwa produk unggulan yang akan dikembangkan adalah produk asli dari daerah, bukan berdasar pada ketentuan pusat. Otomatis penentuan produk unggulan haruslah melalui penilaian berdasarkan keadaan lapangan daerah, tidak dari ketentuan pemerintah pusat. Sehingga peran Pemerintah Daerah (Pemda)

menjadi sangat krusial dalam menentukan kebijakan penentuan produk unggulan yang akan dikembangkan di daerah.

Pengembangan OVOP yang berfokus pada Industri Kecil Menengah (IKM), membutuhkan strategi agar mencapai tujuannya sebagai tulang punggung perekonomian. Dalam Permenperin No. 78 Tahun 2007, beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai OVOP adalah sebagai berikut:

- 1) Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat Lokal;
- 2) Pemanfaatan pengetahuan, tenaga kerja, dan sumber daya lokal lainnya yang memiliki keunikan daerah;
- 3) Perbaikan mutu dan tampilan produk;
- 4) Promosi dan pemasaran pada tingkat Nasional dan Global.

Strategi ini sangat jelas menggambarkan bahwa diharuskan adanya kolaborasi yang kuat baik dari tingkat pusat sampai daerah. Keterlibatan aktif swasta dan masyarakat lokal juga menjadi keharusan agar strategi pengembangan produk unggulan di daerah dapat berhasil dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

#### 2.1.4 Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Pada tahun 2014, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Pengertian produk unggulan dalam Permendagri tersebut adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi

masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Pemda juga diberikan kewenangan yang luas dalam menetapkan produk unggulan daerah. Penetapan PUD, sebelum ditetapkan dilakukan penentuan potensi unggulan yang dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti sumbangan produk tersebut dalam PDRB, mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah. Penentuan potensi unggulan dilakukan melalui kajian akademik. Kriteria penetapan PUD adalah sebagai berikut:

- 1) Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.
- 2) Sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.
- 3) Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan memberikan kontribusi terbesar bagi ekonomi daerah.
- 4) Dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah

meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.

- 5) Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan daerah adalah menggunakan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.
- 6) Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.
- 7) Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan. Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.
- 8) Sarana dan prasarana produksi adalah kemudahan bagi pengusaha PUD untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.
- 9) Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.
- 10) Manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.
- 11) Harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

Kriteria-kriteria di atas sangat jelas menggambarkan bahwa PUD harus berkarakteristik daerah setempat dan mampu memberikan kontribusi besar dalam perekonomian daerah. Selain itu, ketersediaan pasar, teknologi dan harga yang baik juga menjadi faktor kunci lainnya dalam pemilihan PUD. Perencanaan juga dibuat untuk jangka menengah dan jangka

panjang. Strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan PUD diantaranya: Peningkatan kualitas daya tarik PUD, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan promosi dan investasi PUD, peningkatan kerjasama, peningkatan peran serta masyarakat serta peningkatan perlindungan terhadap PUD.

### 2.1.5 Analisis Rantai Nilai (*Value Chain Analysis, VCA*)

Rantai nilai merupakan suatu cara pandang dimana bisnis dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal dari tiga sumber dasar yaitu aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan (*Pearce & Robinson* dalam *Wibowo*, 2014).

Analisis rantai nilai dapat digunakan untuk mendefinisikan secara lebih menyeluruh keunggulan maupun kelemahan dari suatu sektor atau industri. Hal ini dikarenakan analisis rantai nilai melihat dari sisi proses dari setiap rantai nilai di dalam suatu sektor, mulai dari rantai input, produksi sampai dengan rantai produk akhir. Penggunaan analisis rantai nilai juga memungkinkan terpilihnya satu rencana strategis sehingga dapat memunculkan keunggulan kompetitif.

Kerangka rantai nilai membagi aktivitas

dalam perusahaan menjadi dua kategori umum yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama atau fungsi lini yaitu aktivitas yang terlibat dalam penciptaan fisik produk, pemasaran dan transfer ke pembeli, serta layanan purna jual. Aktivitas pendukung atau fungsi staf membantu perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur atau input yang memungkinkan aktivitas-aktivitas primer dilakukan secara berkelanjutan.

Konsep rantai nilai juga dapat diperluas melalui pemahaman bahwa organisasi harus berinteraksi dengan para supplier, para distributor, dan pelanggan. Hal ini terkait dengan posisi suatu organisasi dalam suatu rantai nilai produk untuk meningkatkan keunggulan. Dengan memahami posisi organisasi dalam satu rantai nilai, organisasi dan pihak eksternal terkait seperti supplier, distributor dan pelanggan secara kolektif membentuk *value system*.

Untuk setiap mata rantai nilai, dilakukan *Need assessment*. *Need assessment* adalah satu proses yang memotret kebutuhan dan prioritas dari suatu sektor. Melalui *Need assessment*, akan didapatkan informasi dasar tentang permasalahan ataupun kesenjangan antara kebutuhan dan prioritas. Penggunaan *Need assessment* juga membantu dalam menentukan intervensi apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada setiap mata rantai nilai.

Gambar 2.2 Konsep Rantai Nilai



## 2.2 Kerangka Berpikir

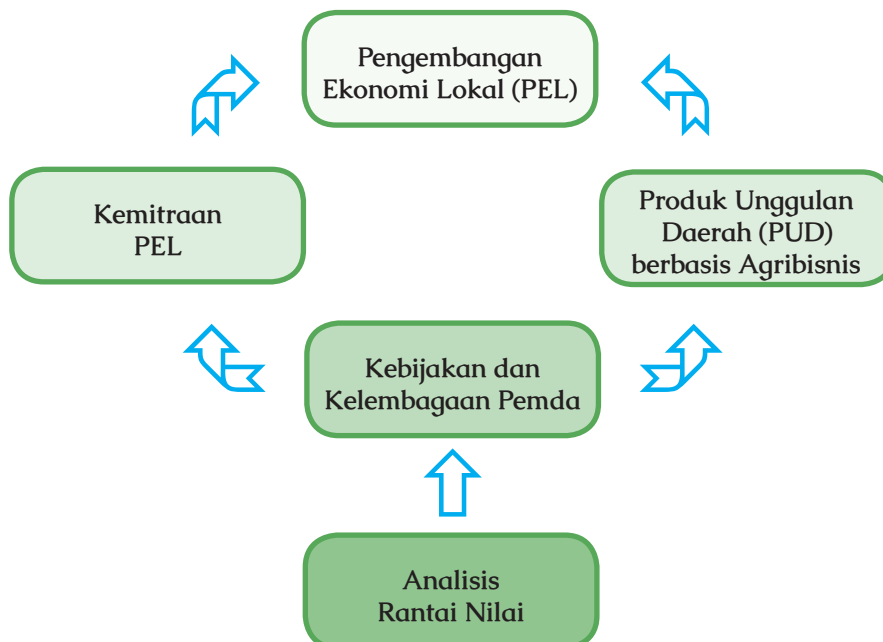
Terlepas dari aneka silang pandangan perihal desentralisasi dan otonomi daerah, namun semua sepakat bahwa tujuan akhir dari sistem kebijakan tersebut adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pada level instrumentasinya, kepada Pemda diberikan diskresi dan kewenangan besar untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan yang menysasar pada pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial di daerahnya. Dalam aspek ekonomi, kerangka intervensi dan strategi pembangunan dalam konteks otonomi dan Pembangunan Ekonomi Lokal (*Local Economi Development, LED*) seharusnya berbasis kepada potensi lokal dan keunggulan masing-masing daerah. Dengan berbasis potensi lokal dan unggul di masing-masing daerah, akan membuka kesempatan bagi tenaga kerja lokal.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) membutuhkan dua aspek yaitu Kemitraan dan Produk Unggulan. Kedua aspek tersebut dibutuhkan, agar pengembangan

potensi lokal ini dapat dilakukan dengan optimal. Selain itu, juga diperlukan dukungan kebijakan yang fokus agar pengembangan produk unggulan dapat dikembangkan secara optimal. Untuk menjalankan kebijakan atau strategi, dukungan kelembagaan harus menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari PEL. Kelembagaan yang kuat akan membuat strategi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dengan adanya kelembagaan, kemitraan antar pihak dalam PEL dapat berjalan menjadi salah satu wahana PEL.

Fakta di era desentralisasi sejauh ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tidak memiliki fokus yang jelas (strategi-fokus) sebagai prioritas dalam mengembangkan perekonomian di daerahnya. Hal ini terlihat dari instrumen kebijakan, fiskal hingga level programatik yang dikembangkan Pemda yang menunjukkan belum optimalnya pembangunan lokal berbasis produk unggulan yang dimiliki saat ini (*existing*) maupun potensi pengembangan ke depan. Produk unggulan di suatu daerah umumnya sekedar produk unggulan yang diusahakan mayoritas masyarakat

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir





di daerah tersebut. Tidak optimalnya pengembangan produk unggulan sebagai salah satu strategi pembangunan telah membuat produk unggulan tidak memiliki daya saing dan bahkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Strategi-fokus yang dimaksud di sini adalah dukungan kebijakan yang sistematis dan fiskal yang memadai sebagai terlihat pada tahapan perencanaan (RPJD, RPJMD, RKPD), kebijakan fiskal (APBD) dan kebijakan strategis lainnya seperti kebijakan yang memayungi kemitraan antar *stakeholder* terkait di daerah. Selain dukungan kebijakan tersebut, daya dukung kelembagaan juga diperlukan. Bahkan untuk pengembangan produk unggulan dibutuhkan kemitraan yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholders* lainnya. Untuk itu, diperlukan kelembagaan yang kuat untuk mendukung kemitraan tersebut. Kelembagaan

dimaksud dapat berbentuk forum komunikasi, forum dialog kebijakan, forum *stakeholders* yang dipayungi landasan legal.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kebutuhan kebijakan untuk pengembangan ekonomi lokal (PEL) melalui produk unggulan, maka dilakukan analisis rantai nilai (*Value Chain Analysis, VCA*). Analisis rantai nilai ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam dan mendetail interaksi antar aktor maupun peran dari masing-masing aktor (*stakeholders*) yang terlibat. Dengan mengetahui interaksi dan pola/tipologi hubungan akan diketahui kondisi faktual maupun permasalahan dalam pengembangan ekonomi lokal. Sehingga nantinya kebijakan yang dibuat akan mencapai pada titik unkit permasalahan yang krusial dalam pengembangan produk unggulan. ■



## 3. Metodologi Studi

### 3.1 Pendekatan Studi

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang tepat untuk menggali data dan informasi mendalam tentang rantai nilai usaha kakao di Ende: dari rantai nilai input sampai dengan rantai nilai pemasaran. Dengan pendekatan demikian diharapkan secara induktif terbentuk suatu interpretasi dan pemahaman terhadap makna rantai nilai kakao dan masalah pengembangan iklim usaha maupun interaksi antar stakeholder yang terlibat. Untuk maksud itu pula, penelitian ini bertipikal deskriptif: menggambarkan dan menjelaskan secara analitis apa (gambaran situasi), mengapa dan bagaimana pola-pola (tipologi) masalah terjadi di masing-masing titik rantai nilai.

### 3.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah penilaian atas berbagai titik/tahapan dalam rantai nilai pengembangan kakao di Ende. Rantai nilai yang dianalisis adalah rantai nilai input (saprodi), budidaya, pengolahan hingga pemasaran dan kegiatan lanjutan lainnya. Daerah yang dijadikan lokasi studi adalah penghasil suatu komoditas unggulan yang relatif signifikan, di mana dalam kasus Kabupaten Ende adalah produk kakao.

### 3.3 Lokasi Studi

Studi ini dilaksanakan di Kabupaten Ende. Penggalan informasi dan pengumpulan data di lapangan dilakukan selama 4 (empat) bulan, yakni dari bulan Juli hingga Oktober 2015. Pemilihan lokasi studi, antara lain, merujuk Keputusan Menteri Pertanian No.46 Tahun 2015 tentang

Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional. Kepmentan tersebut menempatkan sejumlah daerah (termasuk Ende) ke dalam klasifikasi wilayah perkebunan.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi/wawancara dan *focus group discussion* (FGD) dengan *stakeholders* kakao di Kabupaten Ende. Sebagai pendukung data primer, dalam studi ini dikumpulkan data sekunder tentang perkebunan kakao di Kabupaten Ende yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian serta dari lembaga/instansi lainnya. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data regulasi seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah. Data-data regulasi juga diperoleh dari situs Kemenhukham, Kementan, Kemendagri, Pemda dan sumber lainnya yang valid.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden

Pengumpulan data primer dalam studi ini dilakukan melalui tiga cara yaitu:

- 1) Observasi berupa pengamatan langsung terhadap latar dan objek penelitian.
- 2) Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) kepada narasumber terpilih atau para *stakeholder* usaha kakao di Kabupaten Ende.
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* kakao di Kabupaten Ende.

Pemilihan narasumber dalam studi ini berdasar purposive sampling: narasumber dipilih berdasarkan jenis informasi atau pertimbangan yang sudah ada/ditetapkan sebelumnya dan adanya identifikasi atas kelompok/orang yang memiliki kualifikasi tertentu (terkait jabatan, kepakaran dan pengalaman dalam usaha kakao). Namun di lapangan, sebagai bagian metode purposive sampling adalah dilakukan pula pengembangan kategori/subjek narasumber lain berdasar teknik snowballing (keterkaitan informasi, rekomendasi nama, dan seterusnya).

Bertolak dari teknik pengumpulan data di atas, narasumber yang sudah diwawancarai merupakan stakeholders kakao yang terkait langsung dengan kegiatan usaha pada setiap rantai nilai kakao di Kabupaten Ende: petani, pengepul tingkat desa/kecamatan, pengepul besar, penyedia sarana produksi, penyuluh, serta Pejabat Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ende dan pejabat SKPD terkait. Sedangkan pengumpulan data sekunder dalam studi ini dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penilaian atas sumber-sumber valid seperti situs Kementerian maupun Pemda.

### 3.6 Metode Analisis

Untuk menjawab rumusan permasalahan, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan metode analisis rantai nilai. Porter (2001), mendefinisikan Analisis Rantai Nilai (Value Chain Analysis) sebagai alat untuk memahami rantai nilai yang membentuk suatu produk. Rantai nilai ini berasal dari aktifitas-aktifitas yang dilakukan, mulai dari bahan baku dari pemasok hingga produk akhir

sampai ke tangan konsumen, termasuk juga pelayanan purna jual.

Tujuan dari analisis rantai nilai adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap utama kegiatan usaha kakao dimana pelaku rantai nilai dapat meningkatkan nilai produk untuk konsumen atau menurunkan biaya dan mengefisienkan kerja. Penurunan biaya atau peningkatan nilai tambah (*value added*) dapat membuat suatu usaha atau industri lebih kompetitif. Berdasarkan analisa rantai nilai, terdapat dua aktivitas bisnis, yakni aktivitas utama (*primary activities*) dan aktivitas pendukung (*support activities*)<sup>1</sup>.

Analisis rantai nilai kakao yang dilakukan dalam studi ini hanya terbatas pada pemetaan masalah yang ada pada masing-masing rantai nilai usaha kakao; tidak sampai kepada analisis efisiensi di setiap mata rantai nilai usaha komoditi tersebut. Dengan pemetaan masalah ini, diharapkan dapat dianalisis satu titik ungu yang dapat dijadikan pemecahan bagi pengembangan rantai nilai usaha kakao di Ende.

Selain menggunakan metode analisis rantai nilai, dalam studi ini juga digunakan *regulatory-review* dalam melakukan kajian regulasi terkait. Analisis ini dilakukan melalui identifikasi setiap regulasi yang berlaku baik ditingkat pusat maupun daerah untuk perkebunan kakao. Setelah itu dilakukan analisa terhadap dokumen kebijakan yang dinilai signifikan keterkaitan atau pengaruhnya bagi kegiatan usaha kakao pada masing-masing rantai nilai (Input-Budidaya-Pengolahan-Pemasaran). ■

---

1) Aktivitas utama adalah semua aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan penambahan nilai terhadap masukan-masukan dan mentransformasikannya menjadi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Aktivitas ini meliputi: *inbound logistics*, operasi, *outbound logistics*, pelayanan, pemasaran dan penjualan. Aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang mendukung atau memungkinkan semua aktivitas utama berfungsi dengan efektif. Aktivitas pendukung ini meliputi: infrastruktur, sumberdaya manusia, dan iptek.

## 4. Gambaran Umum Usaha Kakao di Kab. Ende

### 4.1 Kakao sebagai Produk Unggulan

Dalam RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019, salah satu strategi untuk mencapai misi percepatan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan produksi dan inovasi pertanian dan perkebunan berdasarkan potensi lokal. Di bidang perkebunan, implementasi strategi ini memerlukan pemetaan produk unggulan. Pemetaan ini diperlukan untuk menetapkan produk unggulan yang menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah. Strategi ini kemudian ditautkan dengan pendekatan spasial pembangunan yang bertumpu pada Desa. Kombinasi pembangunan berbasis potensi unggulan dan bertumpu Desa ini, antara lain, melatarbelakangi lahirnya rumusan Visi Kabupaten Ende 2014-2019 yang mengedepankan “karakteristik daerah” dan “membangun dari Desa” sebagai strategi mencapai Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

Proses pemetaan produk unggulan sebagai substansi program prioritas Kabupaten Ende tentu memerlukan indikator yang tepat, mengingat mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani sawah dan ladang dengan sistem tumpang sari, yang berarti menanam beberapa komoditas di dalam satu lahan. Komoditi perkebunan merupakan sumber pendapatan terbesar petani, di mana terdapat 4 (empat) jenis komoditi dengan produksi tertinggi yaitu kelapa, jambu mente, kemiri, dan kakao. Dari empat komoditi penting ini, kelapa mengalami penurunan produksi secara drastis yaitu dari produksi pada tahun 2012 sebesar 8.876,03 ton menjadi 4.034,66 ton di tahun 2013. Sedangkan keempat komoditas

andalan lain secara umum mengalami peningkatan produksi pada tahun 2012. Indikator yang dipakai untuk menetapkan produk unggulan prioritas, antara lain, berkaitan dengan pertimbangan *livelihood*, luasan lahan, tingkat produktivitas, dan pasar (*market*). *Livelihood* menggambarkan seberapa besar ketergantungan masyarakat dalam mencari penghidupan di usaha komoditas tersebut dan jumlah tenaga kerja yang terserap di produk tersebut. Sedangkan peningkatan perluasan lahan dan produktivitas serta kondisi pasar kondusif menjadi indikator penting untuk menentukan sebuah produk unggulan layak diprioritaskan. Luasan lahan dan produktivitas adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan dari suatu komoditas. Dengan luasan lahan yang memadai dan juga produktivitas tinggi, maka tentunya akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi juga, terutama kepada *key actor* seperti petani. Selain luasan lahan dan produktivitas, faktor pasar juga menjadi faktor yang mempengaruhi suatu komoditas menjadi komoditas unggulan. Kondisi pasar yang berkesinambungan, permintaan yang selalu ada, akan menjadi daya dukung yang baik bagi pengembangan suatu komoditas menjadi komoditas unggulan.

Tabel 4.1 di halaman selanjutnya menunjukkan data sejumlah komoditi unggulan berdasarkan sebagian indikator tersebut.

Dari gambaran situasi di atas, kakao kiranya tepat dipilih menjadi produk unggulan Kabupaten Ende, sekurangnya berdasarkan beberapa alasan berikut. Pertama, kakao memiliki pertumbuhan

Tabel 4.1 Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Ende 2013/2014

Komoditi	TBM		TM		Luas TT/TR (ha)		Jumlah Luas (ha)		Produksi (ton)		Produktivitas (kg/ha)		Jumlah KK	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kelapa	2,793.60	2,973.08	7,930.40	7,931.60	98.20	93.80	10,822.2	10,998.48	8,574.37	8,747.88	1,081	1,103	16,754	17,017
Mete	3,404.40	3,294.50	4,358.90	4,374.50	101.5	106.7	7,864.80	7,775.70	3,663.82	3,673.47	841	840	12,304	12,104
Kopi	3,414.85	3,409.25	5,373.70	5,079.30	90.70	91.00	8,879.25	8,579.55	3,298.61	3,105.13	613.84	611.33	13,298	13,298
- Arabika	1,695.70	1,690.10	2,608.60	2,314.20	30.20	30.50	4,334.50	4,034.80	1,824.93	1,623.92	700	702	5,823	5,823
- Robusta	1,719.15	1,719.15	2,765.10	2,765.10	60.50	60.50	4,544.75	4,544.75	1,473.68	1,481.21	533	536	7,475	7,475
Kakao	3,118.22	3,267.08	4,583.94	4,610.92	70.17	65.77	7,772.33	7,943.77	3,920.64	4,469.84	855	969	10,056	10,300
Kemiri	2,566.40	2,551.90	5,761.70	5,776.50	93.36	92.06	8,421.46	8,420.46	5,322.46	5,337.79	924	924	11,844	11,843

Sumber: Dishutbun Kabupaten Ende, 2014

produktivitas paling tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Kakao mengalami peningkatan produktivitas dari 855 kg/ha pada tahun 2013 menjadi 969 kg/ha pada tahun 2014. Peningkatan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan mente dan kemiri, serta kelapa dan kopi. Produktivitas kelapa memang meningkat tetapi tidak signifikan yaitu, 1,081 kg/ha pada tahun 2013 meningkat menjadi 1,103 kg/ha pada tahun 2014. Sementara produktivitas mente menurun dari 841 kg/ha pada tahun 2013 menjadi 840 kg/ha pada tahun 2014, produktivitas kopi 613.84 kg/ha tahun 2013 menjadi 611.33 kg/ha tahun 2014. Dan, kemiri tidak mengalami perubahan produktivitas yaitu 924 kg/ha pada tahun 2013 dan 2014. Kedua, pada tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi peningkatan luasan lahan pada komoditas kakao, yakni dari sebelumnya 7772 Ha menjadi 7943 Ha. Ini adalah peningkatan paling tinggi dibandingkan komoditas lainnya, sebesar 2%. Ketiga, dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang berusaha/bekerja di komoditas kakao, yakni sebanyak 300 KK.

Dari aspek pasar, harga komoditas kakao tampak paling tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Komoditi kakao juga merupakan komoditi perdagangan

internasional yang memiliki nilai yang tinggi. Di Kabupaten Ende, kakao merupakan salah satu komoditas yang tidak diatur tata niaganya oleh pemerintah daerah, sehingga harga biji kakao di tingkat petani ditentukan oleh mekanisme pasar bebas. Petani juga bebas menjual hasil panennya kepada para pedagang pengepul, baik berupa biji berkulit (gelondong) maupun biji tanpa kulit. Akibatnya, petani bebas memasarkan hasil panennya dan pedagang pengepul bebas menetapkan harganya (BKPM Kabupaten Ende, 2013).

Selain analisis deskriptif di atas dalam melihat perubahan dari masing-masing komoditas, analisis lain yang digunakan dalam menentukan komoditas yang tepat menjadi komoditas unggulan bagi Kabupaten Ende adalah *Share Analysis*. Di sini, *share analysis* dapat memperlihatkan peran suatu komoditas tertentu di dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Tabel 4.2 di samping memperlihatkan pangsa (*share*) dari masing-masing komoditas.

Dari analisis pangsa di atas, dapat dilihat bahwa kakao merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Ende dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya. Untuk pangsa dalam PDRB Ende, komoditas Kakao menyumbang sebanyak 0.29%, disusul mente sebanyak 0.18%, kelapa

Tabel 4.2 Peran Komoditas Kakao dalam Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja

## Pendapatan (2014)

			Kakao	Mente	Kelapa	Kemiri
1	PDRB Kabupaten Ende	(Rp.)	926.924.370.000,00	926.924.370.000,00	926.924.370.000,00	926.924.370.000,00
2	PDRB Sektor Pertanian	(Rp.)	306.922.030.000,00	306.922.030.000,00	306.922.030.000,00	306.922.030.000,00
3	PDRB Sub sektor perkebunan	(Rp.)	78.345.210.000,00	78.345.210.000,00	78.345.210.000,00	78.345.210.000,00
4	Peran komoditas :					
	a. penerimaan rata-rata	(Rp/ha/Tahun)	33.915.000,00	21.000.000,00	4.963.500,00	4.620.000,00
	b. luas kebun produktif	(ha)	7.943,77	7.775,70	10.998,48	8.420,46
	c. penerimaan total usaha tani (axb)	(Rp/tahun)	269.412.959.550,00	163.289.700.000,00	54.590.955.480,00	38.902.525.200,00
	d. penerimaan tenaga kerja	(Rp/tahun)	26.156.598,01	13.490.556,84	3.208.024,65	3.284.853,94
	e. penerimaan total (c+d)	(Rp/tahun)	269.439.116.148,02	163.303.190.556,84	54.594.163.504,65	38.905.810.053,94
	f. pangsa dalam PDRB Ende (e:1)	(%)	0,29	0,18	0,06	0,04
	g. pangsa dalam PDRB pertanian (e:2)	(%)	0,88	0,53	0,18	0,13
	h. Pangsa dalam PDRB Perkebunan (e:3)	(%)	3,44	2,08	0,70	0,50
Penyerapan Tenaga Kerja (2013)						
5	TK Kab. Ende	(orang)	178.905	178.905,00	178.905,00	178.905,00
6	TK sektor Pertanian	(orang)	45.856	45.856,00	45.856,00	45.856,00
7	TK subsektor perkebunan	(RT)	84.361	84.361,00	84.361,00	84.361,00
8	TK usaha tani komoditas	(RT)	10.300	12.104,00	17.017,00	11.843,00
Peran Komoditas						
9	pangsa TK dalam Ende (8:5)	(%)	0,0576	0,07	0,10	0,07
10	pangsa TK dalam pertanian (8:6)	(%)	0,2246	0,26	0,37	0,26
11	pangsa TK dalam perkebunan (8:7)	(%)	0,1221	0,14	0,20	0,14

0.06%, dan kemiri sebesar 0.04%. Peran komoditas kakao terhadap PDRB di sektor pertanian juga menyumbang prosentase tertinggi dibandingkan komoditas lain, yakni sebesar 0.88%, disusul dengan mente 0.53%, kelapa 0.18%, dan kemiri 0.13%. Sedangkan dalam PDRB perkebunan, komoditas kakao menyumbang sebanyak 3.44%, disusul mente 2.08%, kelapa 0.7% dan kemiri 0.5%.

Jika dianalisis lebih lanjut, Kepala Keluarga (KK) petani yang bekerja di sektor komoditi kakao memiliki pendapatan per bulan yang lebih besar dibandingkan dengan KK yang bekerja di sektor lain. Pendapatan petani kakao per bulan adalah Rp. 2.179.716,00. Jumlah ini diperoleh dari pendapatan total petani kakao (Rp 269.412.959.550,00) dibagi jumlah KK yang bekerja di sektor kakao (10.300 kk), kemudian dibagi 12 bulan. Pendapatan yang diterima petani kakao ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan petani mente sebesar Rp. 1.124.213,00, petani kelapa sebesar Rp. 267.334,00, dan petani kemiri Rp. 273.737,00.

*Share* komoditas kakao terkait penyerapan tenaga kerja tidak jauh berbeda dengan komoditas lainnya seperti kelapa, jambu mente dan kemiri. Hal ini terjadi karena, karakteristik petani di Ende mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sawah dan ladang serta komoditi perkebunan lainnya yang dibudidayakan secara tumpang sari, sehingga sangat mungkin tenaga kerja yang berusaha di komoditas kakao juga berusaha di komoditas lainnya seperti kelapa dan jambu mente.

## 4.2 Profil Perkebunan Kakao Ende

Kabupaten Ende merupakan salah satu kawasan kakao di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 46/Kpts//PD.300//2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional. Penetapan ini memiliki dasar yang jelas jika melihat kandungan mutu dan profil umum perkebunan kakao berikut.

## 4.2.1 Kandungan Mutu Kakao Ende

### 4.2.1.1 Kadar Air Kakao

Kadar air mempengaruhi rendemen hasil dan daya tahan biji kakao terhadap kerusakan, terutama saat proses pengangkutan dan pengudangan. Biji kakao yang memiliki kadar air tinggi rentan terhadap serangan jamur dan serangga. Selain itu, berpengaruh terhadap kondisi cita rasa dan aroma dasar yang sulit untuk diperbaiki kembali pada proses berikutnya. Standar kadar air biji kakao yang berkualitas ekspor adalah 7,5 %. Jika lebih tinggi dari nilai tersebut membuat biji kakao tersebut tidak aman disimpan dalam waktu yang lama. Sedangkan jika kadar air rendah membuat biji kakao tersebut menjadi rapuh. Menurut penelitian BPKMD Ende dan Lembaga Penelitian Universitas Flores (2013), kadar air biji kakao yang ada di Ende berkisar 2,02 % sampai 3,70 %. Dengan demikian, kakao Ende bisa disimpan dalam waktu yang lama dan memiliki citarasa dan aroma yang baik.

### 4.2.1.2 Kadar Lemak Kakao

Kakao memiliki kandungan lemak yang tinggi. Kandungan lemak dalam biji kakao, turut dipengaruhi proses pengolahan. Sebab pasca pengolahan, kandungan lemak kakao dipengaruhi kadar air, tingkat fermentasi, dan kadar kulit kakao. Musim juga berpengaruh terhadap kandungan lemak. Biji kakao yang berasal dari pembuahan musim hujan mempunyai kadar lemak yang tinggi.

Kandungan lemak biji kakao di Kabupaten Ende berkisar pada 44,69 % sampai 53,48 %. Kandungan lemak ini sesuai dengan standar lemak kakao Indonesia yaitu 49-52 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa kakao Ende memiliki mutu lemak yang baik. Biji kakao dengan kandungan lemak seperti ini menjadi bahan baku industri yang bermutu dalam pembuatan coklat yang bercita rasa enak (BKPM Ende & Unflor, 2013).



Berdasarkan kandungan mutu di atas, kakao kabupaten Ende, memiliki kualitas produk yang tidak jauh berbeda dengan kualitas kakao dari daerah lain di Indonesia. Ini menjadi peluang pasar yang cukup terbuka baik untuk tujuan ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan kata lain, potensi untuk menggunakan komoditas dan industri kakao sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan distribusi pendapatan cukup terbuka.

#### 4.2.2 Perkebunan Kakao Ende

Kakao (*Theobroma cocoa L*) merupakan komoditas yang sesuai dengan perkebunan rakyat, karena tanaman ini berbuah sepanjang tahun sehingga dapat menjadi sumber pendapatan. Terbukti, dalam rentang waktu tahun 2007–2011 produksi kakao Indonesia tercatat sebanyak 903.092 ton per tahun yang sebagian besar perkebunan dikelola oleh rakyat dan selebihnya perkebunan besar negara serta perkebunan besar swasta (Ditjen Perkebunan, 2012). Untuk ekspor, kakao mencapai 400.000 ribu ton dan penghasilan devisa terbesar setelah kelapa sawit dan karet.

Kabupaten Ende, sebagaimana tertuang dalam naskah RPJMD tahun 2014–2019, menjadikan kakao sebagai komoditas pilihan utama untuk dikembangkan sebagai andalan dalam prioritas pembangunan. Pada tingkat kecamatan, terdapat beberapa wilayah yang menjadi sentra produksi, seperti di Kecamatan

Nangapanda dengan luas areal tanam 1.126,3 ha, Kecamatan Wewaria dengan luas areal tanam 917,88 ha, Kecamatan Wolowaru dengan luas areal tanam 822,10 ha, Kecamatan Ende dengan luas areal tanam 710 ha, Kecamatan Lio Timur dengan luas areal tanam, 589,91 ha, Kecamatan Detusoko dengan luas areal tanam 544,83 ha, dan Kecamatan Kotabaru dengan luas areal tanam 409 ha. Wolowaru merupakan kecamatan dengan tingkat produktivitas tertinggi, yaitu 1.155 kg/ha dengan jumlah petani sebanyak 1.265 KK. Sementara Kecamatan Nangapanda memiliki tingkat produktivitas sebesar 1.100 kg/ha dengan jumlah petani 550 KK yang dapat dilihat dalam Tabel 4.3 yang ada di halaman selanjutnya.

Dalam Tabel 4.3 menunjukkan kakao di Ende mengalami perkembangan yang signifikan, walaupun terdapat sejumlah faktor pendukung usaha kakao yang belum berfungsi maksimal seperti infrastruktur jalan yang belum memadai. Kondisi ini menghambat arus distribusi dari sentra-sentra produksi ke pasar dan jalur perdagangan secara umum. Dampak dari tidak ada infrastruktur jalan yang memadai terlihat juga pada cukup besarnya beban biaya transportasi yang harus dikeluarkan petani. Selain itu, kebijakan tata niaga belum dirancang dengan baik sehingga investor yang masuk ke Ende sangat minim dan harga kakao sangat bergantung kepada perusahaan (penjual antarpulau) yang berdomisili di daerah tetangga, yakni Kabupaten Sikka. ■

Tabel 4.3 Luas Areal dan Produktivitas Komoditi Kakao Per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2014.

No	Kecamatan	Luas		Produksi (ton)		Produktivitas (kg/ha)		KK	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1.	Ende	2.956,30	2.656,60	1.153,00	952,67	623,04	612,18	4.806	4.806
2.	Ende Timur	75,50	73,60	37,60	36,16	800	800	100	100
3.	Ende Utara	118,9	118,0	45,33	49,20	746	800	150	150
4.	Ende Tengah	20,4	19,7	5,42	5,42	950	950	48	48
5.	Nangapenda	1.097,5	1.126,3	354,97	903,43	443	1.100	550	550
6.	Ende Selatan	25,5	25,5	12,08	11,33	800	750	35	35
7.	Ndona	346,7	351,5	206,40	206,40	1.000	1.000	490	490
8.	Ndona Timur	269,40	278,77	96,56	96,56	800	800	414	414
9.	Detusoko	506,80	545,83	214,11	206,48	748	722	766	766
10.	Wewaria	899,10	917,88	462,96	462,96	900	900	1.383	1.412
11.	Wolowaru	736,40	822,10	454,58	454,58	1.155	1.155	1.133	1.265
12.	Ndori	285,40	293,90	167,63	167,63	1.000	1.000	439	452
13.	Wolojita	189,60	189,60	94,40	94,40	1.000	1.000	240	240
14.	Lio Timur	534,70	586,91	360,14	360,14	1.100	1.100	713	783
15.	Maurole	302,40	302,40	155,07	155,07	900	900	739	739
16.	Detukeli	345,00	322,49	141,36	142,55	800	800	235	235
17.	Kotabaru	463,82	409,70	253,20	255,10	1.000	1.000	713	713
18.	Kelimutu	41,70	41,50	18,36	19,96	891	891	64	64
19.	Maukaro	309,30	309,10	139,00	139,00	1.000	1.000	475	475

## 5. Analisis Rantai Nilai Usaha Kakao

### 5.1 Identifikasi Rantai Nilai

Sistem agribisnis secara umum mencakup subsistem yang bermula dari pemasok sarana produksi (saprodi), usaha pertanian (*farming*), pengolahan, sampai pemasaran (Baga, 2003). Rangkaian proses bisnis dalam usaha kakao di Kabupaten Ende juga meliputi empat titik utama dalam mata rantai tersebut. Dalam hal pemangku kepentingan dan para pihak terkait lainnya (*stakeholder*), dimana pada setiap rantai nilai terdapat *stakeholder* yang sama pada sebagian titik proses, tetapi berganti pemain yang berbeda pada titik proses lainnya.

#### 5.1.1 Rantai Nilai Input (Sarana Produksi/Saprodi)

Pada usaha pertanian kakao, Saprodi tergolong sebagai rantai nilai pertama yang mengawali rangkaian panjang berusaha kakao. Saprodi ini mencakup sarana untuk memulai kegiatan bertani, perawatan, sampai pemanenan. Saprodi untuk perawatan atau pemeliharaan, antara lain berupa gunting pangkas, pupuk dan pestisida. Sementara untuk pemanenan, saprodi yang digunakan adalah gunting potong, sabit, dan alat pemecah buah kakao. Saprodi ini ada yang disediakan sendiri oleh petani dan ada yang dibeli melalui pihak swasta. Umumnya saprodi yang diadakan melalui pihak swasta adalah pupuk, pestisida dan alat perangkap hama.

Pada rantai nilai ini, terdapat dua *stakeholder* yang berperan penting di Kabupaten Ende, yakni Pemda dan pedagang saprodi (Toko Sahabat Tani). Pemerintah memfasilitasi penyediaan saprodi khususnya pupuk bersubsidi.

Pemerintah juga memberikan bantuan dana untuk kelompok tani (poktan) yang digunakan untuk membeli bibit, peralatan, pupuk subsidi, dan pestisida. Sedangkan Toko Sahabat Tani berperan dalam penjualan alat-alat saprodi seperti pupuk bersubsidi, sprayer, pestisida yang berasal dari luar daerah, sedangkan alat-alat pertanian seperti cangkul, sabit, dan lain sebagainya disediakan oleh petani sendiri.

#### 5.1.2 Rantai Nilai Budidaya (Farming)

Mata rantai nilai budidaya berfokus pada kegiatan-kegiatan *on farm* di mana petani memainkan peran sebagai aktor utama. Kegiatan *on farm* merupakan aktivitas yang terkait dengan perawatan kebun seperti penyemprotan pestisida, pemangkasan, pemupukan dan pemanenan kakao. Pada umumnya, tanaman kakao membuah hasil (panen) setelah 3 tahun penanaman (jika menggunakan bibit yang biasa digunakan petani) atau sekitar 1,5 tahun jika menggunakan metode sambung samping. Setelah penanaman, tahapan selanjutnya adalah perawatan kebun yang terdiri dari pemangkasan, pemupukan hingga pemanenan kakao.

Para *stakeholders* lain yang berperan dalam rantai budidaya ini adalah Pemda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, tenaga pendamping, dan kelompok tani (poktan). Pemerintah daerah Kabupaten Ende mengambil peran melalui beberapa SKPD teknis terkait dengan perkebunan kakao antara lain Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3) Kabupaten Ende. Dinas kehutanan dan perkebunan secara structural memiliki beberapa bidang, adapun bidang yang

berkorelasi erat dengan komoditi kakao adalah bidang perkebunan. Seperti yang tercantum pada RENSTRA Dinas Kehutanan dan Perkebunan, bahwa bidang perkebunan bertanggungjawab merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perkebunan meliputi perlindungan tanaman, pengembangan perkebunan serta produksi perkebunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan. Dalam hal peningkatan produksi dan produktivitas, UPTD dibawah Dinas tersebut melakukan pengembangan dan pembibitan berbagai komoditi unggulan, salah satu diantaranya pengadaan bibit unggul kakao. Selain itu Dinas juga berperan dalam memberikan bantuan alat saprodi perkebunan.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3) berperan dalam pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan petani kakao. Kelembagaan penyuluhan di Ende masih satu (terintegrasi) dalam BKP3—desain yang sesungguhnya berbeda dari ketentuan UU No.16 Tahun 2006 yang mengatur bahwa sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan diurus dalam kelembagaan terpisah, yakni Badan Penyuluhan (Bapelu). Kenyataan di Kabupaten Ende menunjukkan, BKP3 berperan besar dalam memenuhi hak petani untuk mendapatkan informasi dan teknologi pertanian.

Pihak LSM dan Kampus yang berperan cukup aktif dalam rantai nilai ini adalah *Swisscontact*, Tananua Flores, *Veco* Indonesia, serta Fakultas Pertanian Universitas Flores. Pada umumnya lembaga independen ini memiliki semangat pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendampingan, menguatkan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan usaha kakao. Kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berperan signifikan sebagai *think center*, mengimplementasikan perannya melalui tri dharma pendidikan

tinggi antara lain pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian. Pada bidang pengabdian masyarakat, lembaga pendidikan tinggi melakukan penyuluhan, pelatihan, pendampingan mengenai cara budidaya Kakao yang baik sejak pemupukan hingga pemanenan. Bidang pengabdian masyarakat lainnya adalah pelatihan, seminar dan *workshop* terkait manajemen keuangan usaha mikro kecil menengah. Diharapkan melalui penguatan kapasitas pengetahuan tentang manajemen keuangan, para pengusaha kakao dapat mengatur atau mengelola *cashflow* keuangan dengan baik. Dalam bidang penelitian, Universitas Flores menjadi *partner* Pemerintah melalui kajian penelitian tentang profil komoditi unggulan di Kabupaten Ende.

Tenaga pendamping dari pemerintah mengambil bagian dalam kegiatan pendampingan dan pelatihan budidaya. Pendampingan dilakukan dalam bentuk penguatan kapasitas pengetahuan petani, umumnya perihal cara-cara budidaya kakao yang baik sejak pemupukan hingga pemanenan. Selain itu, pelatihan juga dilakukan terkait keahlian dasar pemberantasan hama (penyemprotan pestisida). Di sini, beragam obat serangga digunakan: *matador* MA 05, M45 untuk mengatasi penyakit buah busuk, dst. Petani juga diajarkan untuk memanen dengan cara menggunting pada tangkai buah, menghindari teknik konvensional seperti cara menjolok yang umumnya dikenal petani selama ini.

*Stakeholder* lain yang juga memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosio-ekonomi pertanian di Kabupaten Ende adalah para mosalaki. Dalam formasi sosial Ende, mosalaki merupakan kepala suku yang memiliki hak penuh atas seluruh tanah ulayat. Mosalaki memiliki kewenangan untuk membagi tanah dan bahkan menentukan jenis komoditi yang ditanam di atas tanah yang sudah dibagikan. Pada umumnya mosalaki menyarankan petani

untuk menanam tanaman yang cepat menghasilkan untuk keperluan upacara adat dan kehidupan sehari-hari para petani itu sendiri.

Kewenangan mosalaki dan kepatuhan terhadapnya, tentu menjadi dimensi isu tertentu bagi para petani kakao. Kewajiban untuk memberikan kontribusi –entah berupa uang, barang atau hewan peliharaan,– dalam upacara-upacara adat merupakan tanggungan tersendiri bagi para petani. Pada konteks tertentu, ini bisa tergolong sebagai beban ketika para petani harus menyisihkan pendapatannya untuk kepentingan adat dan memprioritaskan keterlibatan dalam upacara adat ketimbang mengurus atau merawat kebun kakao.

### 5.1.3 Rantai Pengolahan Hasil

Tahap pengolahan hasil merupakan aktivitas yang dilakukan pasca pemanenan. Kegiatan yang masuk ke dalam kegiatan pengolahan hasil dimulai dari pemetikan hingga proses fermentasi atau pengeringan kakao. Dalam rantai nilai ini terdapat berapa *stakeholders* yang berperan penting: petani kakao, pemda, LSM, pedagang atau pengepul, dan UPH. Ada pun bentuk dan proses pengolahan hasil yang dilakukan oleh petani adalah sebagai berikut:

#### 1) Pemetikan buah

Pemetikan buah dilakukan dengan memilih buah yang telah matang, yakni buah yang berumur sekitar 3 hingga 4 bulan. Dalam pemanenan, petani biasanya melakukan pemetikan sendiri, dan jarang menyewa tenaga kerja lain. Alasannya, selain ingin menghemat biaya, sebagai suatu perkebunan rakyat umumnya luas lahan dan hasil kakao memungkinkan untuk dipetik sendiri bersama anggota keluarga saja. Pada tahap ini, petani kakao di Ende sudah mendapat pelatihan dari LSM seperti *Swisscontact* dan Tananua tentang cara pemetikan kakao yang baik. Pelatihan

tentang cara pemetikan kakao yang baik ini, adalah salah satu bagian pelatihan tentang pola perawatan kebun melalui cara P3S (Pemangkasan-Pemupukan-Panen sering-Sanitasi).

#### 2) Sortasi

Proses sortasi buah merupakan salah satu tahapan kegiatan yang penting untuk menghasilkan biji kakao bermutu baik. Sortasi buah ditujukan untuk memisahkan buah kakao yang sehat dari buah yang rusak atau terkena penyakit, busuk, dan cacat.

#### 3) Pengupasan buah

Pengupasan buah dilakukan melalui cara pemecahan buah dengan tujuan untuk mengeluarkan dan memisahkan biji kakao dari kulit buah dan plasentanya. Pengupasan harus dilakukan dengan hati-hati, agar buah tersebut tidak terpotong atau terbelah oleh alat pemotong manual. Biji kakao yang terluka mudah terinfeksi jamur.

#### 4) Pemeraman

Pemeraman dilakukan 1-2 hari dan hal ini amat dipengaruhi oleh tingkat kemasakan buah dan lingkungan setempat. Tujuan pemeraman adalah untuk mengurangi kandungan air sehingga memudahkan proses pengeringan. Biasanya proses penjemuran tanpa didahului tahapan pemeraman akan berakibat pada penjemuran yang memerlukan waktu lebih lama.

#### 5) Fermentasi

*Kegiatan fermentasi merupakan inti proses pengolahan biji kakao. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk membebaskan biji kakao dari pulp dan mematikan biji, namun juga untuk memperbaiki dan membentuk cita rasa coklat yang enak serta mengurangi rasa sepat dan pahit pada biji (Nasution, 1996). Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, belum banyak petani di*

*Kabupaten Ende melakukan proses fermentasi tersebut. Dalam hal tidak dilakukan fermentasi, setelah dikeluarkan pengupasan biasanya langsung dikeringkan dengan cara dijemur yang mengandalkan terik matahari.*

Dalam hal dilakukan fermentasi, praktik di lapangan menunjukkan ada beberapa macam teknik. Pertama, petani menggunakan karung sebagai wadah fermentasi selama 3 sampai 5 hari. Kedua, proses fermentasi yang biasanya dilakukan beberapa pengusaha, yakni menggunakan peti fermentasi. Peti fermentasi diberi lubang-lubang dengan tujuan untuk aerasi (mengeluarkan cairan) dan menjaga sirkulasi udara di dalam peti. Hal ini dimaksudkan agar biji kakao tersebut tidak terserang jamur/kapang.

#### 6) Pengeringan

Proses pengeringan bertujuan untuk menguapkan air yang masih tertinggal di dalam biji pasca fermentasi yang semula berkadar 50%-55% menjadi 7% agar biji kakao aman disimpan sebelum dipasarkan ke konsumen. Pengeringan biji kakao umumnya dilakukan dengan tiga cara, yaitu cara penjemuran, mekanis dan kombinasi. Di Kabupaten Ende, pengeringan biji kakao dilakukan para petani melalui cara menjemur biji kakao langsung dibawah sinar matahari dengan menggunakan lantai, terpal, para-para (dinamakan warikoko) ataupun karung sebagai wadah. Lamanya pengeringan berkisar antara 3 sampai 5 hari.

Pada tahap ini, petani mendapat bantuan dari pemerintah daerah dan LSM berupa pelatihan pengolahan hasil dan alat pengering kakao. Bahkan, LSM Tananua melakukan pelatihan kepada UMKM atau kelompok tani Kakao berupa pelatihan prosesing atau pengolahan kakao menjadi barang

setengah jadi atau barang jadi seperti tablet coklat dan pasta coklat.

#### 7) Pengemasan dan pergudangan

Tahapan pengemasan dilakukan dengan menggunakan karung bersih dan ditempatkan di dalam gudang. Adapun jenis gudang penyimpanan yang digunakan adalah gudang bersih dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Selama biji kakao disimpan dalam gudang ini tetap dilakukan proses penjemuran untuk menghindari biji kakao dari serangan kapang.

Pada umumnya, pengolahan hasil biji kakao yang dilakukan petani di Kabupaten Ende belum optimal. Kebanyakan masih mengolah secara asalan, dan hanya sedikit petani yang melakukan pengolahan biji dengan kualitas yang baik. Selain dilakukan petani, proses pengolahan hasil juga dilakukan para pedagang/pengepul kaki lima dan UPH. Kedua *stakeholders* ini pada umumnya melakukan pengolahan lanjutan terhadap kakao yang dibeli dari petani. Biji kakao yang dibeli dari petani ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas biji kakao dan tentu ingin mendapatkan harga yang lebih baik. Sebab, petani menjual biji kakao dengan kualitas “asal-asalan” sehingga para pengepul atau UPH tetap perlu melakukan pengolahan lebih lanjut.

Pengolahan hasil sering menjadi persoalan serius para petani kakao. Sebagai petani tradisional, pada umumnya mereka memiliki keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan fasilitas dalam melakukan pengolahan hasil. Mereka menjual kakao tanpa pengolahan yang baik atau tidak diolah sama sekali. Selain itu, tuntutan ekonomi (membutuhkan uang cepat) memaksa petani menjual kakao tanpa proses pengolahan yang baik. Akibatnya, kualitas kakao rendah dan berujung pada harga yang rendah pula.

Secara kelembagaan, petani kakao Ende belum memiliki wadah kolektif seperti

asosiasi yang fokus kepada masalah pengolahan hasil. Saat ini, kebanyakan petani masih bekerja sendiri-sendiri dan belum terbiasa dengan pola kerja sama dalam wadah asosiasi. UPH juga belum beroperasi optimal dalam melakukan pengolahan biji kakao. Hal ini dikarenakan keterbatasan modal menjadi kendala untuk mengoperasikan alat pengeringan.

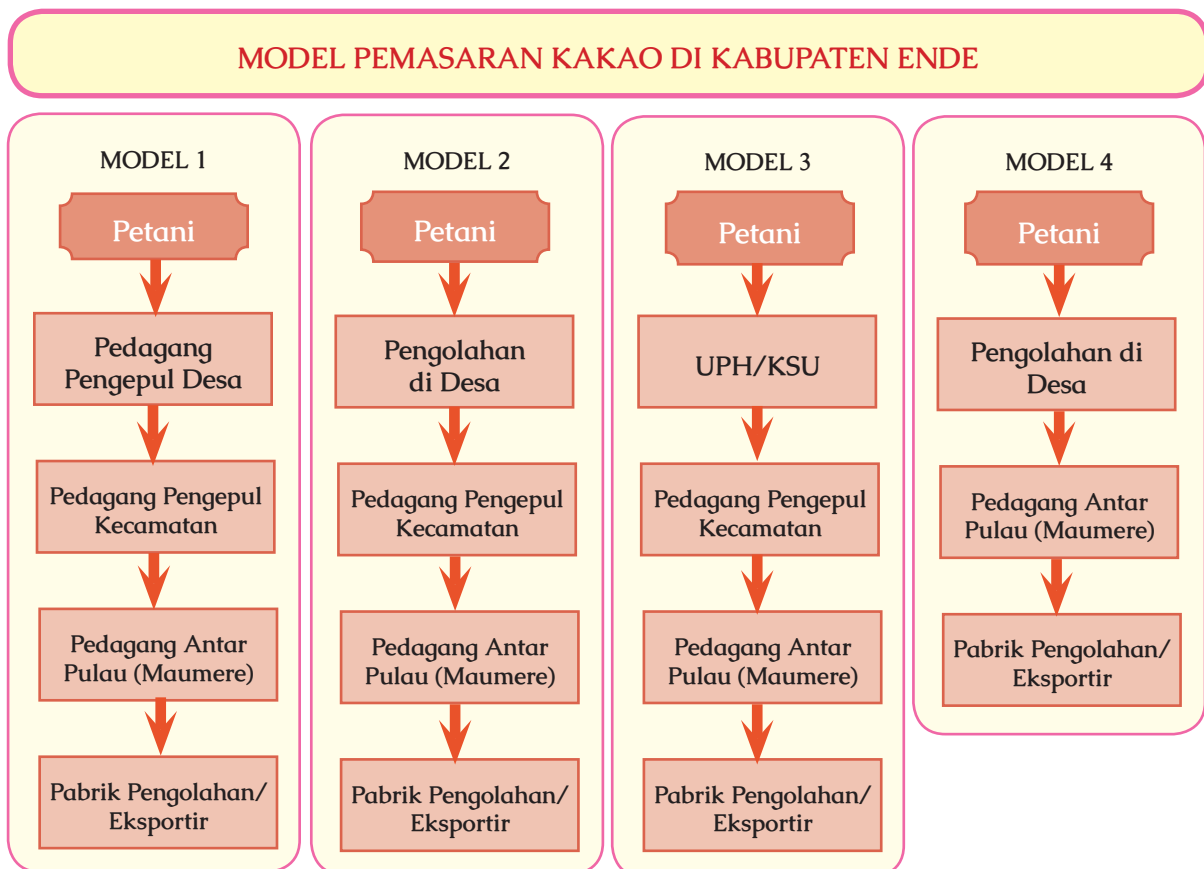
### 5.1.4 Rantai Nilai Pemasaran

Pemasaran merupakan rantai nilai terakhir usaha kakao di Ende. Pemasaran menjadi mata rantai yang sangat menentukan tingkat pendapatan petani kakao, dimana semakin tinggi harga kakao di pasaran, maka tingkat pendapatan petani juga meningkat. Harga kakao petani dipengaruhi oleh jalur distribusi atau jumlah mata rantai nilai pemasaran,

dimana semakin pendek jalur distribusi maka semakin baik harga yang akan diterima petani. Ada empat model utama pemasaran kakao di Ende yang disajikan dalam gambar 5.1 dibawah.

Model distribusi kakao dalam gambar 5.1 dibawah menunjukkan bahwa stakeholders yang berperan dalam rantai nilai pemasaran kakao di Ende adalah petani, pengepul, pedagang atau pengepul desa, pengolah desa, pedagang pengumpul kecamatan, pedagang antarpulau, dan pabrik pengolahan atau eksportir. Petani kakao menjual biji kakao kepada UPH atau pengepul desa dan selanjutnya dijual kepada pedagang pengumpul kecamatan, pedagang antar pulau di Maumere, dan berakhir di pabrik pengolahan dan/atau eksportir. Pedagang pengumpul baik pedagang tingkat desa, UPH, pedagang

Gambar 5.1 Model Distribusi Kakao di Kabupaten Ende



kabupaten sampai pedagang antarpulau di Maumere merupakan stakeholder yang melakukan jual beli kakao, pengeringan, penyediaan gudang, distribusi, penjualan ke pabrik pengolahan dan/atau eksportir. Terakhir, pabrik pengolahan dan eksportir berperan dalam pembelian, pengolahan/produksi olahan kakao dan penjualan kakao ke luar negeri. Umumnya, pabrik pengolahan atau eksportir berlokasi di Kota Makassar (Provinsi Sulsel) atau Kota Surabaya (Provinsi Jatim).

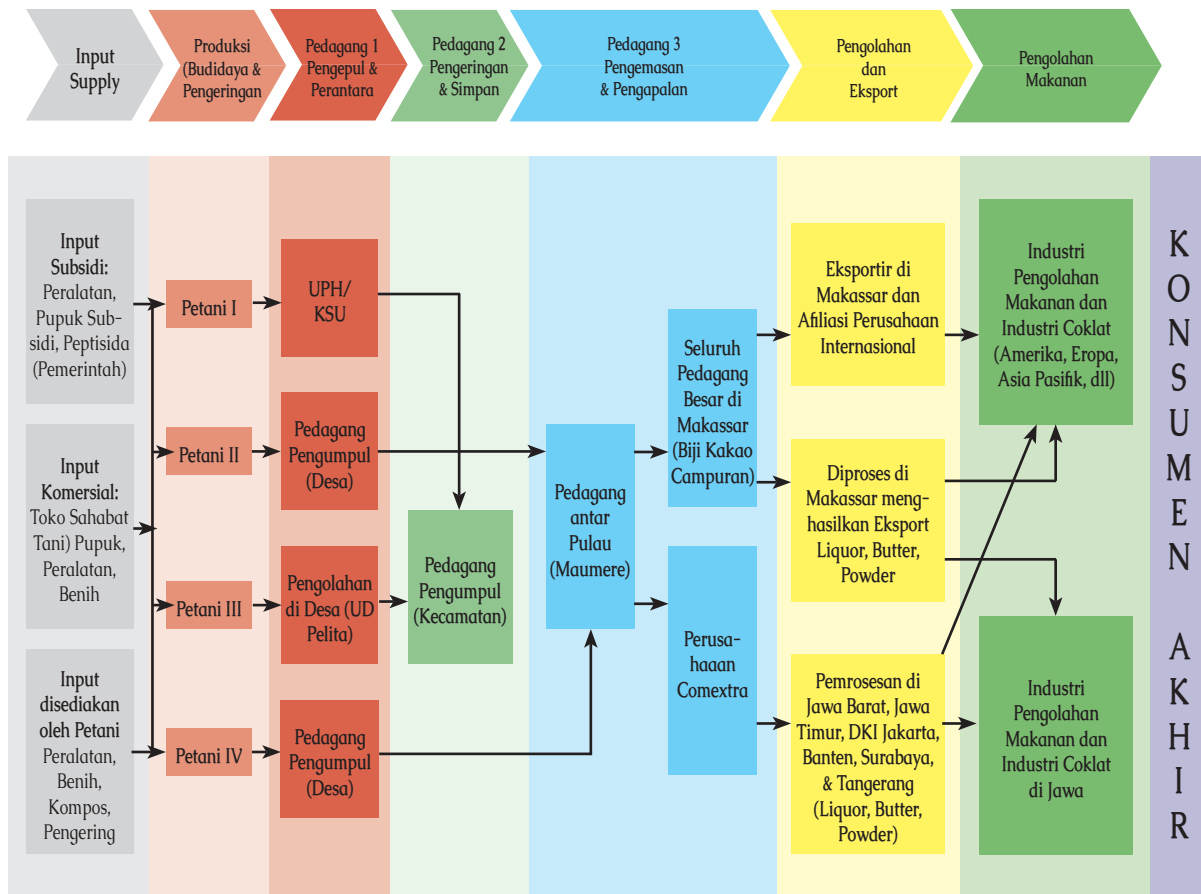
Pemda Ende memainkan peran penting dalam rantai nilai pemasaran. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, aparat SKPD terkait berperan dalam memantau dan menginformasikan harga kepada petani. Selain itu, Pemda

membentuk rumah komoditi sebagai pusat informasi mengenai harga komoditi dan mendirikan BUMDes untuk membantu pemasaran kakao. Tim Ekonomi Daerah juga dibentuk, yang terdiri dari SKPD Dishutbun, Dinas Pertanian, Disperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Bappeda untuk mengkoordinasi seluruh kebijakan ekonomi termasuk pemasaran kakao di berbagai wilayah kabupaten Ende. Peran Pemda ini terlihat, ketika terjadi permasalahan pada tata niaga kakao. Dari sisi Pemda, kebijakan tata niaga kakao di Ende dinilai belum memadai sehingga kakao lebih banyak dijual ke Maumere (Kabupaten Sikka).

UPH belum menunjukkan peran yang maksimal, karena masih minimnya akses

Gambar 5.2 Rantai Nilai Kakao di Kabupaten Ende

### RANTAI NILAI KAKAO DI KABUPATEN ENDE





ke pasar. Kelancaran distribusi kakao di antara mata rantai pemasaran terganggu karena infrastruktur jalan yang tidak memadai. Kenyataan ini menimbulkan tambahan beban biaya waktu dan tenaga baik petani maupun pengepul atau pedagang, sehingga pendapatan yang diterima petani kakao menjadi berkurang dan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan mereka. Kondisi ini menyebabkan petani kakao tidak memiliki daya tawar di hadapan para pedagang atau kekuatan pasar. Selain itu, secara kelembagaan petani tidak memiliki asosiasi yang mendongkrak posisi tawar mereka baik ketika mendapatkan saprodi maupun dalam proses pemasaran biji kakao.

## 5.2 Stakeholder dan Peranannya dalam Rantai Nilai Usaha Kakao

Setiap rantai nilai tersebut memiliki *stakeholder* yang memainkan peran tertentu dalam dinamika usaha kakao. Hasil penelitian lapangan menunjukkan ada *stakeholder* yang memberi kontribusi signifikan, namun sebagian lainnya belum menampilkan peran positif sesuai yang diharapkan. Padahal, pengaruh *stakeholder* di dalam pengembangan usaha kakao turut menentukan dinamika kebermasalahan di setiap mata rantai nilai kakao. Bagian ini menguraikan peran *stakeholder* dan pola hubungan antar *stakeholder* dalam rantai nilai kakao di Ende.

### 5.2.1 Petani Kakao

Petani kakao merupakan *stakeholder* sentral dalam usaha kakao di Ende. Skala peran petani kakao terlihat pada keterlibatannya dalam seluruh rantai nilai kakao, tidak hanya pada mata rantai budidaya sebagaimana yang biasa menjadi anggapan banyak pihak selama ini. Selain itu, alur usaha kakao juga terarah dari dan ke petani kakao (lihat gambar 5.2).

Pada rantai nilai input sarana produksi (saprodi), petani kakao merupakan

*stakeholder* yang sangat membutuhkan saprodi sebagai prakondisi untuk memulai usaha kakao. Artinya, tanpa saprodi tersebut, petani belum bisa memulai tahapan usaha kakao. Petani membutuhkan pupuk, pestisida, dan alat bertani semisal cangkul dan sabit. Lantaran alasan dan keperluan demikian, pada rantai nilai ini, petani menjadi *stakeholder* yang aktif mencari atau membeli saprodi.

Ketika saprodi tersedia, petani kakao berlangkah ke rantai nilai budidaya terutama kegiatan *on farm* kakao. Petani melakukan perawatan kebun kakao mulai dari penyemprotan pestisida, pemangkasan, pemupukan dan berakhir pada pemanenan kakao. Pada rantai nilai ini, petani menjadi aktor yang bersentuhan langsung dengan budidaya kakao. Narasumber di lapangan menyatakan bahwa petani mendapat bantuan dari Pemda dan NGO berupa program pelatihan dan penyediaan alat bantu budidaya berupa pestisida, pupuk bersubsidi, dan gunting pemangkas. Namun, program pelatihan dan bantuan sarana produksi ini menjadi tidak signifikan ketika berbenturan dengan cara pandang petani kakao terhadap usaha kakao. Petani kakao di Ende belum melihat kebun sebagai “tempat usaha/perusahaan”, kakao sebagai komoditi bisnis, dan mempraktikkan cara kerja bisnis berlandas mental wirausaha yang unggul. Bagi mereka, kebun kakao hanya sebatas sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan individual-keluarga (biaya pendidikan, kesehatan) maupun kebutuhan sosial-budaya (upacara adat, biaya wurumana dan membantu tetangga dalam acara “minum ai petu”).

Cara pandang di atas berpengaruh terhadap keseriusan petani dalam merawat kebun kakao yang tentu berdampak pada tingkat produktivitas kakao dan pendapatan itu sendiri. Akibatnya, petani jarang mendapatkan “keuntungan” yang bisa dimanfaatkan sebagai modal untuk

meningkatkan usaha kakao. Kondisi ini berdampak lanjut pada peran (perilaku) petani pada rantai nilai pemasaran. Karena tuntutan kebutuhan, petani menjual kakao ke pengepul kaki lima atau UPH tanpa pengolahan seperti pengeringan atau fermentasi.

### 5.2.2 Kelompok Tani (Poktan)

Kelompok tani (poktan) adalah wadah kolektif sebagai kumpulan sejumlah petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas atau sejumlah komoditas serumpun, dan tekad untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Poktan berfungsi sebagai media musyawarah (informatif dan edukatif) di antara petani dan diharapkan berkontribusi penting dalam mengakselerasi pembangunan pertanian dan perkebunan.

Dalam konteks usaha kakao di Ende, poktan memiliki peran penting sebagai sarana memperoleh pupuk subsidi. Bahkan terdapat regulasi pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pertanian No.82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Peraturan ini mensyaratkan setiap petani harus bergabung dalam poktan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Penelitian di kabupaten Ende menunjukkan bahwa persyaratan ini memang memiliki dampak positif dan negatifnya. Berdampak positif apabila anggota memandang poktan tidak

sekadar persyaratan tetapi menjadikannya sebagai wadah untuk proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit pengumpulan hasil produksi dan pemasaran kakao. Sebaliknya, berdampak negatif atau tidak memberi kontribusi penting bagi petani apabila anggota melihat poktan semata-mata sebagai persyaratan dan bahkan menganggapnya sebagai beban.

### 5.2.3 Pemerintah Daerah

Dalam konteks otonomi dan desentralisasi, Pemda memiliki peran penting dalam usaha kakao di kabupaten Ende. Sesuai RPJMD 2014-2019, Pemda sudah menetapkan

Permentan No.82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani ditujukan sebagai payung hukum pembinaan bagi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Peraturan ini mengatur tentang pedoman menumbuhkembangkan Poktan dan Gapoktan, penyusunan rencana definitif kelompok tani (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK), serta pedoman sistem kerja latihan dan kunjungan.

Secara khusus, pedoman tentang rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK), yang menjadi bagian dari peraturan ini, mengatur juga tentang rencana kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani dalam rentang waktu satu tahun yang disebut dengan RDKK Pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi ini adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas petani. Namun, sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, bahwa, fasilitasi pupuk bersubsidi diberikan kepada petani dengan luas lahan maksimal seluas satu atau dua hektar bagi petambak serta hanya akan diberikan kepada setiap petani yang bergabung dalam poktan.

Pengurus poktan diharapkan dapat memotivasi petani lainnya untuk bergabung dalam poktan serta bersama-sama menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi. Dengan demikian, hanya petani yang tergabung dalam kelompok tani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini berarti, petani di luar kelompok tani tidak boleh mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

kakao sebagai salah satu produk unggulan kabupaten Ende. Tentu hal ini terejawantah dalam seluruh peran dan keterlibatan pemda dalam rantai nilai usaha kakao. Seperti petani, pemda berkontribusi pada setiap rantai nilai kakao. Instansi-instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, atau DPRD setempat merupakan lembaga yang berpartisipasi dalam implementasi pengembangan usaha kakao di Ende.

#### 5.2.4 Pedagang dan Perusahaan

Pedagang merupakan *stakeholder* yang dominan menentukan harga dalam rantai usaha kakao di Ende. Banyak faktor yang menjadi penyebab situasi ini, antara lain, terkait sistem dan kebijakan tata niaga pemda yang kurang memadai, kualitas kakao petani, ketiadaan organisasi petani, belum memiliki standar SNI, dsb. Dari tingkat paling bawah (pembeli langsung dari petani dengan sistem *door to door*) sedangkan pedagang atau pengepul kaki lima menentukan harga kakao dengan memperhatikan kondisi biji kakao; apakah masih basah atau kering? Selanjutnya, pedagang akan melakukan pengolahan lagi jika ingin mendapatkan harga yang lebih baik ketika menjual ke pedagang kecamatan atau pedagang antarpulau. Dengan demikian, saat ini pedagang yang mendapatkan nilai tambah dari pola distribusi dan pemasaran biji kakao di Ende.

#### 5.2.5 Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan sebenarnya menjadi *stakeholder* yang mendukung usaha kakao terutama dari sisi permodalan baik bagi petani maupun pedagang kakao. Namun, peran ini menjadi tidak signifikan ketika terjadi benturan antara posisi bank sebagai lembaga profit dengan petani kakao yang tidak memiliki kepastian dengan keuangan usaha mereka. Di satu sisi, petani enggan mengambil kredit bank karena ketidakpastian hasil kakao, namun pada

sisi lain bank tak ingin mengambil resiko (merugi). Meskipun bank memiliki sistem kredit untuk para petani kecil, keraguan petani untuk mengambil kredit tetap menjadi faktor krusial yang menghambat. Karena itu, bank membutuhkan “jembatan” yang bisa menghubungkan mereka dengan para petani kakao. Jembatan ini bisa diperankan oleh pemda atau LSM. Fungsi peran penjematan dalam hal ini adalah sebagai penjamin kredibilitas petani atau poktan, pihak penjamin haruslah merupakan pihak yang mengenal baik, telah lama melakukan pendampingan pada petani atau poktan tersebut. Yang menjadi akar persoalan adalah bahwa pihak yang berperan sebagai penjematan atau penjamin sangatlah minim.

#### 5.2.6 Lembaga Swadaya Masyarakat

Di Kabupaten Ende terdapat sejumlah LSM yang berperan aktif dalam pengembangan usaha kakao antara lain Tananua Flores, *Swisscontact*, Sahabat Cipta, Veco Indonesia, dan lainnya. Mereka melakukan pemberdayaan kepada para petani kakao. Pada aspek teknis, LSM memberikan pelatihan P3S dan teknik peremajaan. Pada aspek non-teknis, LSM memberi pengarahan untuk mengoptimalkan sumber daya desa dengan adanya konsep pides/pikel dalam RPJMN 2014-2019 sehingga dapat lebih terarah dalam penyusunan dokumen kebijakan perencanaan anggaran. Selain itu, LSM juga memberikan asistensi di bidang pemasaran seperti yang dilakukan Tananua Flores. LSM ini mendirikan UD Pelita untuk mengolah kakao menjadi barang setengah jadi.

#### 5.2.7 Eksportir

Pihak eksportir berperang penting dalam rantai usaha kakao di Ende, termasuk dalam melakukan pembelian kakao dari pedagang antarpulau di Maumere (Kabupaten Sikka), sehingga harga atau pendapatan yang diterima petani kakao

sangat ditentukan eksportir. Eksportir yang beroperasi saat ini adalah PT Comextra dan PT Mars. Eksportir-eksportir ini berkedudukan di Makasar dan Surabaya.

Selain melakukan pembelian, eksportir seperti PT. MARS juga melakukan pelatihan kepada Kelompok Tani dan Petani di Ende. Pelatihan ini memiliki tujuan agar terdapat kontinuitas dari produksi petani, yang pada akhirnya akan menjaga supply produksi kakao. Manfaat bagi eksportir dari pelatihan ini adalah tidak sulit mencari petani atau kelompok tani yang menghasilkan biji kakao dengan kualitas yang sesuai kebutuhan.

### 5.2.8 Koperasi

Koperasi membantu alur tata niaga. Dengan model pembelian langsung dari petani, harga kakao akan berpihak pada petani. Kebijakan dan standar harga beli di koperasi umumnya lebih tinggi dari harga pasar atau pengepul, yang terlebih dahulu ditetapkan aturan main perihal spesifikasi kualitas agar memperoleh harga beli yang bagus. Selain itu, koperasi terbukti bisa mengurangi sistem ijon melalui pinjaman dengan bunga kecil untuk mengatasi kebutuhan harian dan kebutuhan mendesak yang sering dialami petani.

### 5.2.9 Universitas

Universitas Flores (Unflor) merupakan kampus yang terlibat dalam rantai nilai kakao di Ende, terutama melalui Fakultas Pertanian (Faperta), yang memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para petani kakao, khususnya dalam melakukan pembudidayaan. Selain itu, Faperta juga melakukan penelitian di bidang pertanian. Meskipun tidak fokus pada kakao, tetapi hasil penelitian Faperta memberikan kontribusi penting untuk pengembangan kakao di Ende, seperti hasil penelitian terkait pengaruh budaya terhadap pertanian, masalah teknis pertanian, dan sebagainya.

### 5.2.10 Lembaga Adat/Mosalaki

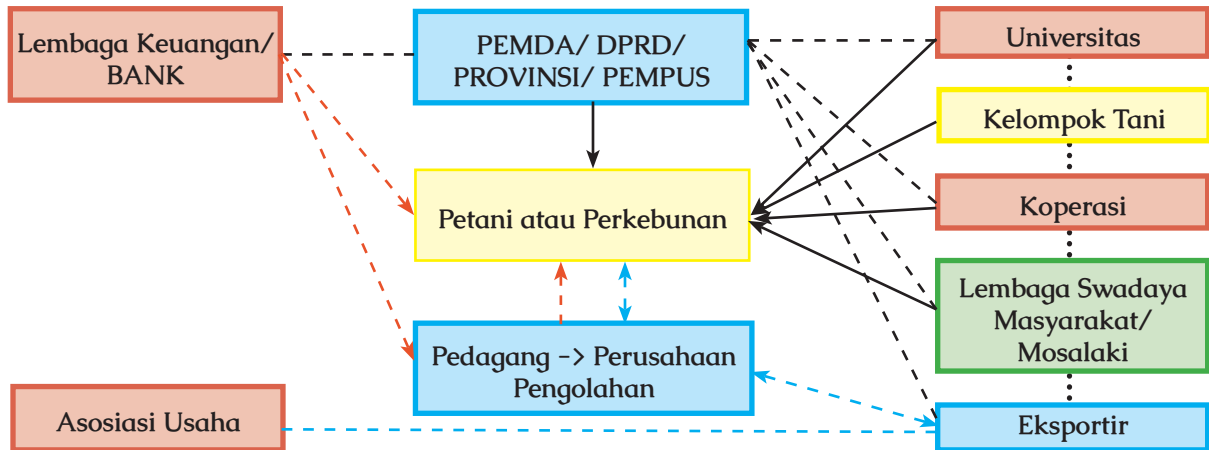
Pranata adat, khususnya Mosalaki, masih menjadi bagian penting dan diprioritaskan dalam tata kehidupan sosial dan perekonomian di masyarakat Ende. Meski tidak ditetapkan secara tertulis dan formal, masyarakat termasuk petani kakao merasa wajib terlibat dalam kegiatan adat dan memberi kontribusi baik berupa uang maupun tenaga dan waktu bagi penyelenggaraan upacara adat. Apalagi, secara adat, tanah-tanah para petani kakao merupakan milik Mosalaki, yang berkuasa penuh atas tanah ulayat masyarakat Ende. Tetua adat ini berwenang membagi tanah kepada masyarakat dan lebih jauh lagi turut menentukan jenis komoditas yang ditanam. Kepatuhan pada adat dan mosalaki mempengaruhi pemanfaatan keuangan rumah tangga yang pada sebagian kasus ikut berdampak pada kegiatan usaha kakao.

### 5.3 Kebermasalahan Pengembangan Kakao

Studi ini juga menggarisbawahi: kakao memang layak untuk dijadikan komoditi unggulan berdasar alasan-alasan seperti pertimbangan *livelihood*, luas lahan, dan produktivitas. Penetapan produk unggulan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Permendagri No. 9 Tahun 2014), di mana salah satu indikator kesejahteraan adalah tingkat pendapatan. Dengan demikian, penetapan kakao sebagai produk unggulan ditujukan kepada peningkatan pendapatan petani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sejumlah masalah di dalam usaha kakao perlu dianalisis sehingga kelak bisa merancang strategi kebijakan yang efektif. Melalui pendekatan *value chain analysis*, penelitian ini menemukan permasalahan utama pengembangan Kakao di Kab. Ende adalah **Pendapatan Petani Kakao masih rendah**. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan utama tersebut, diantaranya:

Gambar 5.3 Peta Stakeholder Kakao di Ende



Keterangan:  
 — Penunjang Kegiatan  
 - - - Hubungan Pembinaan  
 ..... Hubungan Kerjasama

Tabel 5.1 Matriks Peran Stakeholder

NO.	AKTOR	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
1.	Penjual Sapropdi (Cth: Toko Sahabat Tani)	a. Menjual alat-alat pertanian seperti pupuk, gunting pangkas, dan gunting buah b. Terlibat dalam penjualan/ distribusi pupuk bersubsidi c. Menyediakan penyuluh swasta dari perusahaan produsen alat pertanian	a. Menjual alat-alat sapropdi b. Membantu penyediaan pupuk bersubsidi c. Membantu petani dalam penggunaan alat-alat sapropdi melalui petugas penyuluh swasta
2.	Petani Pembibit	a. Melakukan pembibitan/ klon baru b. Melakukan pendampingan pada petani untuk pembibitan	a. Melakukan rekayasa pembibitan lebih intensif b. Menyediakan bibit dengan kualitas unggul c. Memberikan pelatihan pada petani kakao tentang pembibitan
3.	Dinas Pertanian dan Peternakan ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan	a. Melakukan distribusi untuk bantuan sapropdi seperti pupuk, alat pertanian dan lainnya. b. Melakukan distribusi bibit subsidi/klon dari ICCRI dan PUSLITKOKA	a. Melakukan riset yang fokus atas kesesuaian bibit ataupun melakukan rekayasa teknologi b. Membuat program pengembangan Kakao secara intensif dan berkelanjutan c. Optimalisasi peran dalam pemasaran produk kakao, sehingga harga jual petani lebih baik d. Menyediakan informasi harga pasar kakao e. Menyediakan program penyuluhan bagi petani kakao

NO.	AKTOR	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
			f. Menyediakan kerangka program dan regulasi pengembangan sektor kakao secara terpadu. Termasuk kerangka koordinasi dengan BKP3 dan SKPD lainnya
4.	Petani Kakao	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimal dalam melakukan kegiatan budidaya kakao melalui konsep P3S (Pemupukan-Pemangkasan-Panen Sering-Sanitasi) dalam merawat kebun</li> <li>b. Melakukan pengolahan hasil panen, umumnya masih berkualitas biji asalan</li> <li>c. Menggunakan alat pengering Warikoko (plastik USV)</li> <li>d. Melakukan penjualan biji kakao setelah dipanen ataupun dikeringkan kebanyakan keada pedagang kaki lima (Pengepul desa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petani melakukan P3S di kebun kakaonya</li> <li>b. Mengikuti Peningkatan kapasitas dan pengetahuan dalam pemeliharaan kebun dan menerapkannya</li> <li>c. Melakukan pengeringan dan fermentasi dengan baik, sehingga kualitas kakao baik dan meningkatkan harga jual</li> <li>d. Meminimalisir penjualan kakao yang masih basah</li> </ul>
5.	Penyuluh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pendampingan kepada petani walaupun jumlahnya belum ideal (1 orang penyuluh untuk setiap desa)</li> <li>b. Melakukan rapat koordinasi untuk membicarakan permasalahan</li> <li>c. Kapabilitas penyuluh dalam melakukan penyuluhan masih bersifat <i>polivalent</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyuluhan kepada petani sesuai dengan masalah yang dihadapi petani</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas khususnya kapasitas dalam hal pengetahuan pemeliharaan dan pengolahan kakao</li> </ul>
6.	BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Petanian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan anggaran untuk penyuluh</li> <li>b. Menyediakan infrastruktur pendukung penyuluhan seperti kendaraan, bangunan dan pendukung teknis operasional</li> <li>c. Menyediakan program pelatihan untuk penyuluh, baik pelatihan ditingkat lokal, propinsi maupun nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pengembangan sektor kakao, khususnya dalam hal program penyuluhan</li> <li>b. Memperkuat PPL dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan pengembangan kakao</li> </ul>
7.	Mosalaki (Ketua Adat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengatur jenis tanaman yang boleh ditanam di lahan adat --&gt; Di Lio masih cukup dominan</li> <li>b. Menentukan besaran pembagian lahan bagi petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam menentukan jenis tanaman yang akan ditanam</li> <li>b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sektor kakao</li> </ul>

NO.	AKTOR	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
			sehingga program pemerintah dapat terimplementasikan dengan baik kepada petani. c. Optimalisasi peran AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara) di Kabupaten Ende sebagai forum perkumpulan para mosalaki sebagai jembatan antara Pemerintah dan masyarakat adat, agar tercipta keselarasan antara pembangunan pertanian dengan tetap melestarikan kearifan lokal.
8.	Koperasi Serba Usaha/UPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemrosesan lanjutan, jika biji kakao yang diterima masih membutuhkan proses lanjutan</li> <li>b. Melakukan pengeringan setelah menerima hasil panen petani</li> <li>c. Menggunakan alat pengering warikoko (plastik USV)</li> <li>d. Melakukan pembelian biji kakao sesuai harga pasar</li> <li>e. Menjual biji kakao kepada pabrikan seperti comextra dan Mars</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengeringan dan fermentasi dengan baik, sehingga kualitas kakao baik dan meningkatkan harga jual</li> <li>b. Menyediakan informasi harga pasaran kakao kepada petani</li> <li>c. Membantu pemasaran biji kakao petani</li> <li>d. Ikut serta membeli biji kakao dengan tingkat harga yang sesuai</li> </ul>
9.	Pedagang Pengepul Keliling	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membeli hasil panen petani</li> <li>b. Memasarkan biji kakao kepada pedagang besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membeli kakao dengan harga yang baik</li> <li>b. Tidak melakukan pembelian biji kakao asalan</li> </ul>
10.	Pedagang Besar (UD Fajar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pembelian kepada petani baik perorangan maupun kelompok</li> <li>b. Mengirimkan hasil pembelian kepada pedagang besar luar daerah (Sikka)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan informasi harga pasaran kakao kepada petani</li> <li>b. Melakukan pembelian biji kakao dari Petani sesuai harga dan kualitas di pasaran</li> </ul>
11.	Dinas Per-industrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan informasi tentang harga pasar</li> <li>b. Belum memberikan bantuan akses pasar langsung kepada petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan bantuan akses pasar kepada petani</li> <li>b. Lebih intensif dalam melakukan promosi produk kakao ke luar daerah melalui pameran dll.</li> </ul>
12.	Pemerintah Kabupaten Ende (Bappeda, Bagian Hukum dan lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjadikan Kakao sebagai program unggulan di RPJMD</li> <li>b. Mendukung dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani</li> <li>c. Merencanakan pembangunan rumah komoditi (pusat informasi) tentang informasi harga dan komoditi</li> <li>d. Melakukan Analisis pasar kakao belum ada regulasi untuk mengembangkan produk unggulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan komitmen dalam pengembangan kakao, melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan alokasi anggaran yang berasal dari APBD</li> <li>2) Dukungan regulasi untuk pengembangan usaha kakao, sesuai kebutuhan masing-masing aspek rantai nilai.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	AKTOR	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
13.	LSM (Cth.: Tananua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bekerja sama dengan pemerintah kab. Ende</li> <li>b. Melakukan pendampingan kepada petani</li> <li>c. Melakukan kerjasama dengan UMKM untuk prosesing kakao menjadi barang setengah jadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi program LSM dengan pemerintah Daerah sehingga meminimalisasi <i>overlapping</i> (tumpang tindih) program. Sinergitas dan kolaborasi memungkinkan kedua pihak berbagi peran dengan baik.</li> <li>b. Melakukan pendampingan kepada petani kakao</li> </ul>
14.	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan kerjasama dengan BKPMMD tentang produk unggulan kakao.</li> <li>b. Melakukan kajian tentang budidaya dengan kesesuaian lahannya, analisis kandungan, analisis keuangan secara kelembagaan dengan LP2M</li> <li>c. Melakukan pendampingan di Desa Lokoboko tahun 2007. Kendalanya petani tidak mau melakukan pemangkasan</li> <li>d. Melakukan kerjasama dengan PT. Timor Mitra Gemilang (kantor di Kupang), untuk mengusahakan 800 ha Kakao di Sumba.</li> <li>e. Terdapat program pengabdian masyarakat oleh Mahasiswa, baik dengan dana hibah pusat maupun swadaya untuk pengabdian atau pendampingan ke petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah</li> <li>b. Membantu pemerintah daerah dalam riset dan pengembangan secara berkelanjutan, khususnya masih belum ada kajian mengenai struktur tanah dan kesesuaian unsure hara tanah dengan komoditas yang ada.</li> <li>c. Memberikan pendampingan kepada petani secara berkesinambungan, hal ini juga memerlukan peran dari fakultas ekonomi untuk memberi penguatan kapasitas pengetahuan manajemen keuangan usaha tani dan membentuk mental wirausaha melalui pelatihan</li> </ul>
15.	Dinas Koperasi	<p>Melakukan pendampingan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menumbuhkan kelembagaan desa (UBSP dan Arisan)</li> <li>b. Meningkatkan SDM</li> <li>c. Pendampingan (rutin dari dinas)</li> <li>d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana</li> <li>e. Memberikan Modal kepada petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan program penguatan koperasi tingkat petani khususnya dalam hal permodalan dengan akses kredit kepada para petani Kakao</li> <li>b. Melakukan pendampingan kepada kelompok tani terutama dalam hal penguatan kelembagaan kelompok tani</li> </ul>
16.	Unit Pengolahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UPH membeli biji kakao dari petani</li> <li>b. Melakukan pengolahan biji kakao seperti pengeringan dan fermentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengolahan biji kakao</li> <li>b. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani dalam hal pengolahan biji kakao yang berkualitas</li> </ul>



NO.	AKTOR	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
17.	PT. MARS	Melakukan pelatihan setiap 6 bulan sekali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan informasi harga kakao di pasaran</li> <li>b. Melakukan peningkatan kualitas kakao di Kabupaten Ende dengan memfasilitasi dalam sertifikasi biji kakao.</li> </ul>
18.	Perbankan	Menyalurkan kredit kepada petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu petani dalam melakukan permodalan dan kredit</li> <li>b. Memberikan pelatihan proposal dan akses keuangan</li> </ul>

(1) Masih banyak petani kakao yang menjual biji kakao dengan kadar air lebih dari 7 %; (2) Masih banyak petani kakao yang melakukan transaksi dengan sistem ijon; (3) Produktivitas biji kakao rendah yang pada gilirannya mempengaruhi kuantitas kakao yang dijual; (4) Panjangnya rantai perdagangan biji kakao; (5) Kualitas biji kakao rendah; (6) Posisi tawar petani yang tidak kuat. Jika didalami lebih lanjut, maka terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan faktor-faktor tersebut. Permasalahan tersebut di antaranya adalah:

*Pertama*, lemahnya manajemen keuangan rumah tangga. Menjadi praktik jamak, pengelolaan keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan rumah tangga. Para petani biasanya mendahulukan kebutuhan rumah tangga atau keperluan adat. Akibatnya, pembelian saprodi sering dilakukan dengan sistem kredit atau utang. Hal ini berdampak lanjut pada penjualan kakao tanpa memperhitungkan kualitas karena harus membayar utang/kredit. Selain itu, para petani juga akhirnya menggunakan sistem ijon dalam transaksi jual beli hasil kakao. Lemahnya manajemen keuangan ini, juga mendorong petani untuk menjual hasil biji kakao secara 'asalan', dalam artian mutu biji kakao tidak sesuai kebutuhan pabrikan.

*Kedua*, permasalahan keterbatasan modal usaha tani. Permasalahan ini juga menyebabkan produktivitas

dan kualitas biji kakao yang rendah. Keterbatasan permodalan usaha tani juga menyebabkan ketidakmampuan petani dalam pemeliharaan kebun kakao dan juga pengolahan hasil panen biji kakao. Sehingga produktivitas maupun kualitas biji kakao rendah. Selain itu, keterbatasan modal juga sering menjadi alasan bagi petani untuk menjual hasil biji kakao dengan kualitas kadar air diatas 7%. Dampaknya adalah petani hanya menerima harga jual yang rendah dan pendapatan yang tidak memadai untuk melakukan usaha tani kakao.

*Ketiga*, permasalahan selanjutnya adalah lemahnya kapasitas SDM, baik petani maupun penyuluh. Khusus bagi petani, lemahnya kapasitas SDM, lebih kepada kapasitas dalam melakukan pengolahan hasil biji kakao dan pemasaran. Sehingga tingkat produktivitas tidak terjaga dan kualitas biji kakao hasil panen pun tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan pabrikan yaitu kadar air 7%. Kapasitas SDM Penyuluh yang masih berkemampuan polivalen. Artinya, PPL belum memiliki spesialisasi di komoditi tertentu, termasuk pengetahuan dan keahlian khusus terkait kakao. Sehingga terkadang penyuluh tidak bisa memberikan pengetahuan lebih kepada petani dalam aspek pengolahan hasil dan juga pemasaran.

*Keempat*, belum adanya kelembagaan ekonomi yang kuat dan berfokus kepada

pengolahan hasil juga memberikan permasalahan tersendiri. Umumnya, petani masih ingin bekerja sendiri dan belum terbiasa dengan pola kerja sama dalam wadah kolektif seperti asosiasi atau poktan. Selain itu, lantaran terdesak oleh kebutuhan praktis dan mendesak dalam kehidupan sehari-hari, para petani melakukan pengolahan sendiri untuk kemudian dijual secara cepat. Unit Pengolahan Hasil (UPH) juga belum beroperasi optimal dalam melakukan pengolahan biji kakao. Keterbatasan modal, antara lain, menjadi kendala UPH dalam mengoperasikan alat pengeringan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, maka terdapat dua permasalahan yang menjadi penyebab empat permasalahan di atas, yaitu (1) Kurangnya peran lembaga keuangan (Perbankan dan Non Perbankan); dan (2) Kurangnya Pendampingan. Kurangnya peran lembaga keuangan menyebabkan munculnya permasalahan lemahnya manajemen keuangan rumah tangga dan keterbatasan modal usaha tani. Sedangkan Kurangnya pendampingan menyebabkan lemahnya SDM Petani, lemahnya peran kelompok tani dan juga lemahnya manajemen keuangan rumah tangga. Keseluruhan permasalahan tersebut berakar pada dua hal yaitu Keterbatasan program dan anggaran Pemda dan lemahnya koordinasi antar *stakeholders* kakao. Secara ringkasnya, keseluruhan permasalahan dapat digambarkan dari pohon masalah Gambar 5.4 di samping.

## 5.4. Identifikasi Faktor Internal Usaha Kakao

Identifikasi faktor internal mencakup: (1) ketersediaan tenaga kerja keluarga; (2) penguasaan lahan usaha; (3) penguasaan modal usaha; (4) sarana produksi; (5) pemasaran; dan (6) kelembagaan sosial.

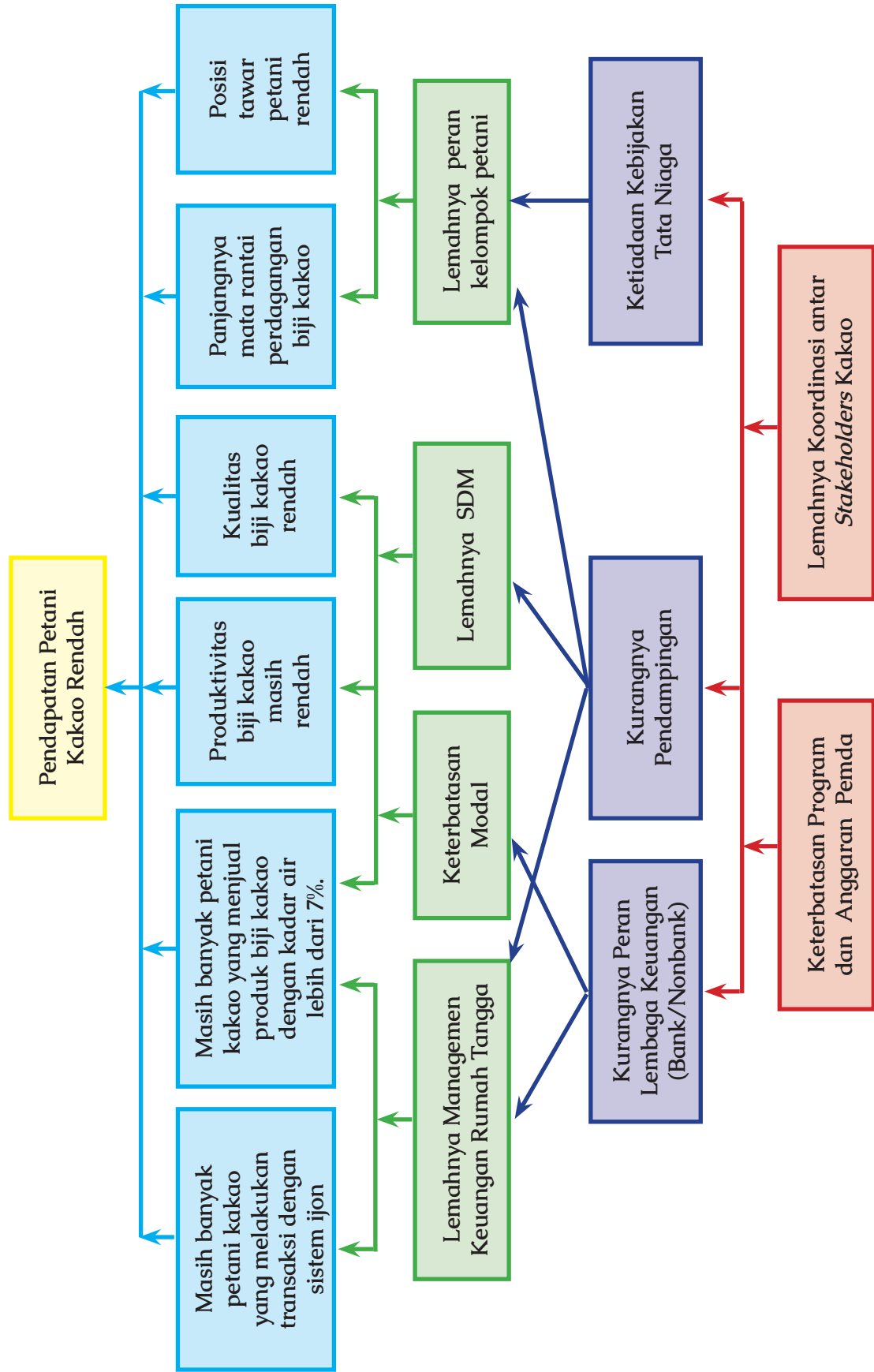
### 5.4.1. Ketersediaan Tenaga Kerja Keluarga (SDM)

Menurut Dishutbun Kabupaten Ende (2014), kepala keluarga (KK) yang bekerja di sektor perkebunan kakao berjumlah 10.300 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 yaitu 10.054 orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kakao menjadi komoditi vital yang diandalkan masyarakat kabupaten Ende. Budidaya kakao yang dilakukan sebagian besar menggunakan sistem tumpang sari membuat seorang KK tidak mutlak hanya memiliki dan bekerja pada komoditi perkebunan saja, tetapi memiliki komoditi yang lain seperti kelapa, kopi, jambu mente, kemiri, tanaman pangan, dan sebagainya.

Peningkatan jumlah KK ini juga mengindikasikan peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kakao. Sebab petani melibatkan anggota keluarganya dalam usaha kakao. Petani kakao jarang, bahkan tidak pernah, menyewa tenaga kerja lain selain anggota keluarganya. Selain untuk menghemat pengeluaran, proses pemanenan biji kakao tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Namun, sebenarnya pengelolaan kebun kakao di Ende sangat tergantung kepada tingkat kemampuan ekonomi dan keluasaan wawasan (pengetahuan/keterlampiran) petani. Pola pikir petani yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjadi maju sangat dipengaruhi pada persepsi mereka apakah menganggap lahannya hanya sebagai lahan pemenuh kebutuhan harian atau betul-betul sebagai “lahan usaha/perusahaannya”, hal ini dibuktikan bahwa pada semua narasumber petani yang terdapat pada titik wilayah total produksi kakao tertinggi yakni nangapanda, wolowaru dan kecamatan Ende—mereka memiliki lahan produktif yang digarap adalah hanya separuh dari seluruh lahan yang dimiliki, dengan demikian seperempat wilayah atau setengah wilayah lahan masih berupa lahan tidur yang ditanami tanaman liar atau pohon berumur panjang lain. Jika

Gambar 5.4 Permasalahan Usaha Kakao di Kabupaten Ende



total lahan tersebut digarap dengan efektif maka volume produksi komoditas tersebut akan meningkat. Sementara signifikansi peningkatan produktivitas lahan, dan kualitas produk adalah faktor utama yang dapat mendorong peningkatan pendapatan petani. Sehingga pantaslah jika kontradktif bahwa komoditi kakao yang unggul, berpeluang pada pasar dunia, berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan petani yang stagnan. Stagnasi kesejahteraan petani juga amat dipengaruhi hal fundamental lain yang telah dipaparkan oleh tim penulis, yaitu pola pikir dan minimnya sikap mental wirausaha. Matriks berikut ini (Tabel 5.2) bisa menggambarkan kenyataan itu.

### 5.4.2 Penguasaan Lahan Usaha

Data Dishutbun (2014) menunjukkan luas lahan kakao di Ende mencapai 7.943,72 ha dengan rincian lahan yang belum menghasilkan (TBM) seluas 3.267,08 ha, lahan tanaman yang sudah menghasilkan (TM) seluas 4.610, 92 ha, dan luas tanaman tua atau rusak seluas (TT/TR) 65,77 ha. Luas lahan kakao menempati peringkat ketiga setelah kelapa dan kopi.

Lahan kakao merupakan milik petani sendiri. Setiap petani memiliki lahan rata-rata 0,5 hektar sampai 1 hektar. Sebagaimana visualisasi dalam matriks petani di atas, petani kakao pada umumnya memiliki lahan potensial yang belum digarap. Lahan tidur ini membuka ruang untuk program ekstensifikasi seperti yang sudah dilakukan Pemda Kabupaten Ende di sejumlah kecamatan seperti Lio Timur, Nangapanda, dan kecamatan-kecamatan baru potensial untuk kakao seperti Wewaria, Wolojita dan Kotabaru.

Kepemilikan lahan menjadi persoalan ketika mosalaki masih memiliki hak pengaturan terkait pembagian dan penggunaan/peruntukan lahan. Ada beberapa desa dimana Mosalaki melarang petani sebagai pengguna hak ulayat untuk

menanam tanaman umur panjang atau tanaman perkebunan. Mosalaki khawatir penggunaan lahan untuk tanaman perkebunan bisa mengalihkan hak kepemilikan ulayat kepada para petani.

### 5.4.3 Penguasaan Modal Usaha

Petani memiliki modal yang mencukupi untuk sebuah usaha kakao. Modal usaha kakao bisa berupa lahan, tenaga kerja, saprodi, dan uang dan Petani kakao memiliki hampir semua modal ini. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah kapasitas pengelolaan modal usaha ini. Misalnya terkait modal uang, sejumlah bank atau koperasi memiliki program kredit lunak untuk petani, tetapi kredit-kredit ini tidak menampakkan hasil sesuai peruntukannya ketika petani memanfaatkannya untuk kebutuhan konsumtif atau kegiatan acara adat. Selain itu, hasil penjualan kakao juga kadang-kadang digunakan untuk konsumsi sehari-hari, acara adat, acara keagamaan, dan sebagainya, sehingga petani selalu merasa kekurangan modal uang dalam budidaya kakao.

### 5.4.4 Sarana Produksi (Saprodi)

Petani membutuhkan ketersediaan saprodi dalam usaha kakao. Untuk mendapatkan saprodi, selain membeli sendiri, petani juga mendapatkan bantuan dari pemerintah dan LSM. Namun, ada sejumlah kendala internal yang menghambat petani untuk memperoleh saprodi ini, antara lain, lantaran kekurangan modal uang dan kesadaran untuk bergabung dengan kelompok tani (poktan). Poktan dibentuk hanya untuk memenuhi syarat mendapatkan pupuk bersubsidi atau bantuan yang lain dari pemerintah dan LSM.

Poktan bisa menjadi media komunikasi (*sharing*) internal dan eksternal petani. Di dalam wadah poktan, para petani bisa saling berbagi informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Poktan juga menjadi perantara petani kepada kelompok

Tabel 5.2 Klasifikasi Petani

	PETANI MAJU DAN BERWAWASAN TANI	PETANI KURANG BERWAWASAN TANI
Petani Mapan Secara Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki pengetahuan tentang bibit dan jenis-jenis bibit yang unggul</li> <li>• Setelah dilakukan pengambilan data primer didapatkan bahwa petani maju adalah hasil atau dampak daripada menjadi anggota kelompok tani.</li> <li>• Diarahkan oleh fasilitator yang ditunjuk oleh masyarakat, dan fasilitator tersebut memiliki pengalaman pelatihan, wawasan teknologi yang baik dan diberdayakan oleh lembaga dampingan.</li> <li>• Melakukan pembibitan dan menjual bibit pada masyarakat umum.</li> <li>• Mengetahui perkembangan harga dunia kakao terbaru, dan memiliki akses informasi tercepat untuk update harga kakao dunia.</li> <li>• Mengetahui manfaat dari teknologi penanaman (seperti sambung pucuk dan sambung samping).</li> <li>• Petani tersebut aktif melakukan diskusi pada poktan</li> <li>• Petani tersebut memiliki rencana jangka panjang terhadap pengembangan usaha taninya.</li> <li>• Memiliki jumlah pohon diatas 100 pohon</li> <li>• Melakukan akses pinjaman dan lancar dalam pembayaran</li> <li>• Memiliki penambahan asset seperti rumah permanen, dapat mengkuliahkan anak, usaha sampingan lain seperti ternak ayam dan babi atau usaha sampingan lain seperti ojek, dan menjual dari hasil kebun lain antara lain pisang, dan kelapa.</li> <li>• Memiliki lahan tidur potensial hanya belum tergarap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tahu tentang berbagai nama jenis bibit yang unggul.</li> <li>• Berada pada poktan yang tidak aktif</li> <li>• Didalam dusun atau poktan tidak didampingi oleh fasilitator.</li> <li>• Tidak mengetahui update perkembangan harga kakao dunia.</li> <li>• Pernah mengalami pelatihan teknik warikoko akan tetapi tidak melanjutkan lagi, karena warikoko rusak, dan menggunakan kembali terpal untuk menjemur kakao.</li> <li>• Tidak selalu setiap hari dalam melakukan pembersihan atau sanitasi kebun.</li> <li>• Kadangkala pada tipe petani tersebut malah ada beberapa yang tidak ikut aktif bergabung dalam poktan.</li> <li>• Tidak memiliki kesadaran untuk menyisihkan keuntungan untuk pembiayaan saprodi.</li> <li>• Petani memiliki masalah dalam penerapan teknologi tanam (sambung samping yang tidak sesuai dengan wilayah) akan tetapi tidak proaktif untuk mencari jalan keluar</li> <li>• Memiliki jumlah pohon diatas 100 pohon</li> <li>• Melakukan akses pinjaman dan lancar dalam pembayaran</li> <li>• Memiliki penambahan asset seperti rumah permanen, dapat membeli kendaraan sendiri, usaha sampingan lain seperti ternak ayam dan babi atau usaha sampingan lain seperti ojek, dan menjual dari hasil kebun lain antara lain pisang, dan kelapa.</li> <li>• Memiliki lahan tidur potensial hanya belum tergarap.</li> <li>• Di kebun (yang berjarak bbrp kilometer) kesulitan dalam akses air dan listrik.</li> </ul>
Petani Kesulitan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki pengetahuan tentang bibit dan jenis-jenis bibit yang unggul</li> <li>• Setelah dilakukan pengambilan data primer didapatkan bahwa petani maju adalah hasil atau dampak daripada menjadi anggota kelompok tani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tahu tentang berbagai nama jenis bibit yang unggul.</li> <li>• Berada pada poktan yang tidak aktif.</li> <li>• Di dalam dusun atau poktan tidak didampingi oleh fasilitator.</li> <li>• Tidak mengetahui update perkembangan harga kakao dunia.</li> </ul>

	PETANI MAJU DAN BERWAWASAN TANI	PETANI KURANG BERWAWASAN TANI
Petani Kesulitan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarahkan oleh fasilitator yang ditunjuk oleh masyarakat, dan fasilitator tersebut memiliki pengalaman pelatihan, wawasan teknologi yang baik dan diberdayakan oleh lembaga dampingan.</li> <li>• Melakukan pembibitan dan menjual bibit pada masyarakat umum.</li> <li>• Mengetahui perkembangan harga dunia kakao terbaru, dan memiliki akses informasi tercepat untuk update harga kakao dunia.</li> <li>• Mengetahui manfaat dari teknologi penanaman (seperti sambung pucuk dan sambung samping).</li> <li>• Petani tersebut aktif melakukan diskusi pada poktan</li> <li>• Petani tersebut memiliki rencana jangka panjang terhadap pengembangan usaha taninya.</li> <li>• Petani tersebut memiliki akses pinjaman akan tetapi sering penggunaan pinjaman untuk pengeluaran rumah tangga lain seperti biaya adat.</li> <li>• Petani tidak teralu merasakan keuntungan hasil usaha tani kakao terhadap kehidupan ekonominya.</li> <li>• Petani tidak memiliki penambahan asset apapun selama kurun beberapa tahun (keadaan rumah masih berdinding semi permanen, tidak memiliki motor, memiliki sejumlah hutang)</li> <li>• Petani tersebut hanya menanam kakao dengan jumlah seadanya (kurang dari 100 pohon)</li> <li>• Petani tersebut sebetulnya memiliki lahan cukup luas (rata-rata 0,5 sd 1 hektar) akan tetapi masih banyak bidang atau lahan tidur yang belum ditanami dan berpotensi sebagai pengembangan usaha.</li> <li>• Terkadang tipe petani adalah tidak dapat memiliki skala prioritas secara logis untuk mendahulukan biaya usaha tani, dan lebih memilih untuk pengeluaran adat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernah mengalami pelatihan teknik warikoko akan tetapi tidak melanjutkan lagi, karena warikoko rusak, dan menggunakan kembali terpal untuk menjemur kakao.</li> <li>• Tidak selalu setiap hari dalam melakukan pembersihan atau sanitasi kebun.</li> <li>• Kadangkala pada tipe petani tersebut malah ada beberapa yang tidak ikut aktif bergabung dalam poktan.</li> <li>• Tidak memiliki kesadaran untuk menyisihkan keuntungan untuk pembiayaan saprodi.</li> <li>• Petani memiliki masalah dalam penerapan teknologi tanam (sambung samping yang tidak sesuai dengan wilayah) akan tetapi tidak proaktif untuk mencari jalan keluar.</li> <li>• Petani tersebut memiliki akses pinjaman akan tetapi sering penggunaan pinjaman untuk pengeluaran rumah tangga lain seperti biaya adat.</li> <li>• Kadangkala petani ini jenis petani yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan keuangan usaha tani kakao, memiliki pinjaman pada beberapa tempat dan kesulitan dalam melakukan cicilan.</li> <li>• Petani tidak memiliki kesadaran bahwa usaha tani kakaonya adalah merupakan “perusahaan” nya.</li> <li>• Petani tersebut hanya menanam kakao kurang dari 100 pohon.</li> <li>• Tidak memiliki usaha lain, hanya mengandalkan panen pohon lain yang jumlahnya sedikit.</li> <li>• Petani tersebut kadangkala mengakses pinjaman liar, dengan bunga yang amat tinggi.</li> <li>• Petani tersebut sebetulnya memiliki lahan cukup luas (rata-rata 0,5 hektar sd 1 hektar) akan tetapi masih banyak bidang atau lahan tidur yang belum ditanami dan berpotensi.</li> <li>• Petani mengalami lebih besar pasak daripada tiang, karena tidak tahu cara mengelola keuangan usaha tani dan keuangan rumah tangga.</li> </ul>

Sumber: Data olahan 2015

eksternal seperti Pemda, Bank, dan LSM. Sejumlah poktan contoh di Tanazozo dan Wolosoko menunjukkan kapasitas cukup memadai dalam memberikan kontribusi nyata bagi para petani.

#### 5.4.5 Pemasaran

Pada rantai nilai pemasaran, petani kakao berposisi sebagai penjual pertama, baik kepada pengepul kaki lima, KSU dan pedagang desa. Petani tidak menjual ke pedagang besar (kecamatan/antarpulau) karena pertimbangan biaya dan waktu. Apabila petani ingin menjual kakao kepada pedagang di kota Ende berarti mereka harus mengalokasikan waktu dan mengeluarkan biaya untuk transportasi. Sejauh ini, menjual ke pengepul atau pedagang desa masih dipilih sebagai langkah taktis untuk memperoleh uang secara cepat.

Kebutuhan mendapatkan uang secara cepat itu menyisakan sejumlah persoalan. Petani, misalnya, umumnya menjual kakao dengan kualitas yang kurang baik atau asal-asalan tanpa melalui proses pengolahan pasca-panen yang baik (fermentasi dan pengeringan). Kualitas kakao demikian tentu mempengaruhi harga jual-beli di lapangan yang ditentukan secara sepihak oleh pengepul atau pedagang kaki lima.

Implikasinya, petani tidak memiliki daya tawar dalam menentukan harga kakao. Kelemahan posisi semacam ini terjadi, antara lain, berakar pada lemahnya kapasitas pengelolaan keuangan rumah tangga petani, poktan yang tidak berfungsi dengan baik, dan berbagai latar sebab lainnya. Ketidakterfungsian ini secara internal sangat dipengaruhi oleh motivasi petani sendiri untuk bergabung dengan poktan. Secara eksternal memang absennya tata niaga Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sangat mempengaruhi posisi petani dalam pemasaran.

#### 5.4.6 Kelembagaan Sosial dan Budaya

Pada umumnya di Indonesia, petani masih terikat dengan struktur dan sistem sosial masyarakat desa. Dalam konteks Flores, desa diidentifikasi dengan kampung yang masih memegang erat tradisi dan menjunjung tinggi kebudayaan khas setempat. Dalam hal ini, kebudayaan seperti dipahami secara luas mencakup berbagai norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat petani tersebut meliputi aturan adat, tanah, lahan garapan, hubungan kekeluargaan, dan kehidupan ekonomi masyarakat desanya.

Tata kehidupan masyarakat Kabupaten Ende yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sawah, ladang, dan kebun dengan sistem tumpang sari. Para petani, termasuk petani kakao masih terikat erat dengan tata aturan adat. Seluruh dinamika hidup petani kakao selalu diarahkan untuk selaras dengan norma adat. Apalagi tanah dimana para petani bercocok tanam dan berkebun adalah hak milik Mosalaki. Mosalaki adalah kepala suku (adat) yang memiliki hak atas seluruh tanah ulayat. Mosalaki yang berwenang membagikan tanah kepada masyarakat. Bahkan, mosalaki juga berhak mencampuri urusan penggunaan tanah dan pilihan tanaman atau komoditas yang ditanam di atas kebun petani. Keterikatan pada norma adat dan struktur sosial pedesaan (kampung) turut mempengaruhi pola pikir dan perilaku para petani kakao di Ende. Para petani rela menghabiskan waktu sehari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk terlibat dalam sebuah upacara adat besar. Mereka rela melepaskan seluruh aktivitas di kebun demi menghadiri acara adat. Sebab, ketidakhadiran seseorang dalam acara-acara tersebut akan mengganggu interaksi dan integrasi sosial sebagai sebuah masyarakat (suku).

Fenomena sosial ini sebenarnya terjadi dalam masyarakat (petani) desa yang masih hidup dalam level subsistens. Pada level

ini, petani menjalankan aktivitas ekonomi (pertanian/perkebunan) sekadar untuk bertahan hidup atau untuk kehidupan biasa sehari-hari, tidak untuk dikomersialisasikan, dan semua produksi ekonomi digunakan untuk konsumsi. Penelitian di kabupaten Ende menunjukkan kenyataan sosial yang sama, dimana mereka memandang kultur bertani dan aktivitas pertanian sebagai sumber mata pencaharian dan cara kehidupan, bukan sebagai usaha untuk mencari keuntungan komersial.

#### 5.4.7 Kelembagaan Ekonomi

Petani kakao di Kabupaten Ende belum memiliki asosiasi atau wadah kolektif, baik untuk memudahkan mereka mendapat saprodi maupun untuk memperkuat posisi tawar saat berhadapan dengan para pedagang/pengepul/eksportir. Petani sebagian besar bergabung dalam poktan-poktan yang bisa dikembangkan menjadi sebuah asosiasi yang memperkuat daya tawar petani. Namun, keanggotaan petani dalam poktan tersebut sering kali karena tuntutan program tertentu yaitu sebagai prasyarat misalnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Di wilayah Kabupaten Ende terdapat beberapa UPH namun belum beroperasi optimal untuk melakukan pengolahan biji kakao (proses pengeringan dan fermentasi). Hal ini disebabkan karena biaya untuk mengoperasikan alat pengeringan membutuhkan biaya yang besar dan UPH tidak memiliki modal yang cukup. Dalam situasi seperti ini, kehadiran koperasi bisa menjadi solusi. Ende memiliki 108 koperasi berbadan hukum. Koperasi-koperasi tersebut berbentuk simpan pinjam dan serba usaha (KSU). Mereka sebenarnya bisa membantu alur tata niaga di kabupaten Ende dengan membeli langsung dari petani. Harga yang ditentukan koperasi tentu berpihak kepada petani kakao. Hal ini tetap tergantung pada kesadaran petani untuk bergabung dengan koperasi-koperasi.

### 5.5 Identifikasi Faktor Eksternal Usaha Kakao

Identifikasi faktor lingkungan/eksternal yang melingkupi dan mempengaruhi kegiatan usaha kakao di Ende meliputi, antara lain, elemen akses permodalan, kebijakan pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), infrastruktur, dan kondisi pasar.

#### 5.5.1. Akses Permodalan

Akses permodalan dalam usaha kakao di Ende bisa dilihat dari dua kutub yang berbeda: Pemda dan Perbankan di satu pihak berhadapan dengan petani kakao di pihak lain. Pertama, menurut Pemda dan Lembaga perbankan, petani kakao di Ende sebenarnya tidak seharusnya mengalami kesulitan mengakses modal/kredit. Karena selain memberikan bantuan, pemerintah dan bank memiliki program dimana petani bisa mengakses modal. Pemerintah sering mengucurkan bantuan baik berupa sarana produksi seperti pupuk, alat pemangkas dan pengering, maupun bantuan dana kepada petani melalui poktan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), misalnya, mengembangkan program kredit untuk para petani kakao. Pada tahun 2007, BRI sudah mendekati dan memberikan kredit kepada sejumlah kelompok petani kakao di Ende. Saat ini pun BRI memiliki program untuk petani kakao seperti KUR, Kupedes Rakyat dan Kupedes. Namun, BRI mengalami kesulitan dalam memberi akses modal kepada petani. Sebagai lembaga profit, BRI memerlukan kepastian tentang pengembalian kredit mereka. Karena itu, data tentang pohon kakao dan potensi hasil kakao sangat diperlukan bank. Di sinilah BRI mengalami kendala karena secara teknis di lapangan terasa sulit bertatap muka dengan para petani. Hal berbeda dialami BRI ketika memberikan kredit kepada pedagang atau pengepul. Pedagang mudah ditemui di pasar atau di tempat usahanya sehingga bisa didata aset yang



dimiliki dan potensi pengembalian kredit. Menurut BRI, untuk mengatasi masalah ini, bank membutuhkan “jembatan” yang menghubungkan mereka dengan petani. Jembatan tersebut berfungsi mendampingi petani sekaligus memberikan jaminan kepada pihak bank. Jembatan ini bisa berupa pemerintah daerah atau LSM.

*Kedua*, dari sisi petani khusus petani dengan ekonomi sulit, akses modal tetap menjadi masalah utama terutama untuk mendapatkan kredit dari bank. Selain letak bank yang jauh dari tempat tinggal mereka (bank pada umumnya hanya ada di kota Ende atau ibukota kecamatan), syarat administrasi yang ditentukan bank juga terasa sulit dan berbelit-belit bagi petani. Lebih dari itu, ketidakpastian hasil kakao membuat petani takut mengambil risiko. Petani lebih memilih untuk meminjam di koperasi yang dinilainya lebih memahami kondisinya.

### 5.5.2 Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan desentralisasi/otonomi daerah membuka struktur kesempatan dan memberikan ruang yang luas kepada Pemda kabupaten Ende untuk membangun perekonomian daerah berbasis kakao sebagai produk unggulan. Oleh karena itu, Pemda kabupaten Ende perlu memiliki komitmen yang harus diwujudkan dalam kebijakan (perencanaan, penganggaran hingga level programatik) bagi pengembangan kakao.

Pemda kabupaten Ende selama ini, memainkan peran tertentu di sejumlah rantai nilai kakao di kabupaten Ende. Pada rantai saprodi, Pemda Ende memfasilitasi penyediaan saprodi berupa bibit, peralatan, pupuk subsidi, dan pestisida. Selanjutnya, pada tahap budidaya kehadiran pemerintah tampak dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan dilakukan penyuluh baik yang PNS maupun Non-PNS. Pemda juga menyediakan alat pengering dan kegiatan penyuluhan untuk

proses pengeringan. Pemda juga memantau dan menginformasikan harga kepada Petani melalui rumah komoditi sebagai pusat informasi harga komoditi. Pemda Ende juga sudah membentuk Tim Ekonomi Daerah terdiri dari SKPD Dishutbun, Dinas Pertanian dan Peternakan, Disperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Bappeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari pengamatan Pemda maupun *stakeholder* yang lain, kebijakan Pemda dalam pengembangan kakao sebagai produk unggulan di Ende masih sangat minim. Kenyataan ini tampak dalam masalah penataan infrastruktur jalan yang tidak memadai, ketiadaan peraturan dan kebijakan tata niaga sehingga kakao dijual ke luar daerah melalui Maumere, sistem kerja dan keahlian PPL yang tidak memenuhi ekspektasi petani, keahlian PPL bersifat polivalent dan dari segi jumlah tidak memenuhi standar ideal satu desa satu PPL dan lain-lain.

Kebermasalahan ini menunjukan bahwa koordinasi di antara SKPD masih belum berjalan dengan baik. Keberadaan Tim Ekonomi Daerah dan rumah komoditi menjadi tidak signifikan ketika harga kakao lebih ditentukan oleh dinamika pasar atau standar yang ditetapkan oleh pedagang mulai dari pengepul sampai tingkat perusahaan dan eksportir. Petani yang menjadi sasaran utama dalam kebijakan penetapan kakao sebagai produk unggulan tidak memiliki daya tawar dalam menentukan harga.

### 5.5.3 Lembaga Swadaya Masyarakat

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan penting dalam pengembangan kakao dan sejumlah komoditi lain di Ende adalah *Swisscontact*, Tananua Flores, Veco Indonesia, dan Sahabat Cipta. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut telah berperan dalam peningkatan produktivitas

kakao, *on farm* hingga *off farm*. Mereka pada umumnya menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani, pendidikan dan mengupayakan pemasaran komoditi kakao, hingga pembentukan petani modern. Pelatihan yang diajarkan antara lain teknologi pertanian seperti teknik sambung samping dan P3S untuk terus memperbaiki tingkat kualitas komoditi.

Salah satu LSM yang patut disebut khusus dalam memainkan peran aktifnya adalah Tananua Flores. Dalam pemberdayaan petani kakao, Tananua memiliki pendekatan berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk intervensi pada wilayah pemasaran, Tananua mendirikan UD Pelita sebagai UMKM yaitu bagaimana produk kakao bisa diproses menjadi barang setengah jadi. Namun terkadang program LSM tumpang tindih dengan program Pemda. Hal ini, menunjukkan kelemahan koordinasi di antara Pemda dan LSM serta *stakeholder* terkait. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik dan penentu arah pembangunan daerah seharusnya menjadi koordinator yang memiliki kebijakan dan kapasitas kelembagaan yang mampu mengarahkan seluruh potensi/*resorsis stakeholder* kepada tujuan yang sama.

#### 5.5.4 Infrastruktur

Infrastruktur jalan yang buruk tetap menjadi persoalan krusial. Jalan yang tidak memadai dari dan ke sentra produksi maupun jalan penghubung ke pusat-pusat distribusi dan perdagangan menyulitkan petani untuk mendapatkan saprodi karena harus mengeluarkan biaya yang tinggi dan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Faktor jalan ini juga yang memaksa petani menjual kakao kepada pengepul atau pedagang kecil daripada pergi ke kota kecamatan atau kota Ende. Selain itu, infrastuktur ini juga mempengaruhi akses petani kepada lembaga keuangan yang hanya berada di kota kabupaten/kecamatan.

Penataan infrastuktur jalan merupakan tanggung jawab Pemda kabupaten Ende. Pemda mengakui penataan infrastuktur tetap menjadi agenda prioritas, namun mensiasati anggaran yang terbatas, Pemda memprioritaskan penataan infrastuktur jalan di kecamatan yang memiliki produktivitas kakao tinggi.

#### 5.5.5 Kondisi Pasar

Dari perspektif pasar, Indonesia menjadi penghasil kakao ketiga terbesar dunia. Fakta ini menggambarkan posisi tawar Indonesia yang terbilang kuat dalam tata perdagangan dunia. Secara mikro ini berarti, pengembangan produk kakao di kabupaten Ende sejalan atau sinkron dengan permintaan pasar dunia dan harapannya dapat memberikan prospek yang bagus bagi para petani kakao lokal.

Dalam *Roadmap* Pengembangan Kakao di Provinsi NTT tertera pernyataan bahwa, harga kakao Indonesia mempunyai keterkaitan erat dengan harga kakao NTT karena perdagangan di sentra-sentra utama produksi kakao menjadi acuan dalam menetapkan harga di tingkat petani. Terkait kasus spesifik di Ende, harga kakao sangat ditentukan pedagang antarpulau di Kabupaten Sikka yang notabene mengetahui dinamika harga kakao dunia. Penentuan harga di Sikka ini mempengaruhi harga yang ditentukan pengepul saat membeli kakao dari petani.

Ketentuan harga kakao yang diserahkan kepada kepentingan/kemauan pasar menggarisbawahi “absennya” Pemda dan lemahnya posisi tawar petani. Pemda yang tak hadir secara signifikan dalam percaturan harga ini antara lain tampak dalam ketiadaan kebijakan atau langkah nyata pengawasan tata niaga di kabupaten Ende. Setali tiga uang, pada sisi lain para petani juga tidak memiliki organisasi yang mampu untuk memperjuangkan atau menaikkan kapasitasnya sebagai produsen kakao.

## 5.6 Regulasi Terkait Usaha Kakao

Kegiatan perkebunan dipayungi oleh peraturan perundangan, salah satunya adalah Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Dalam UU tersebut, beberapa poin seperti perencanaan wilayah perkebunan, penggunaan hak tanah, pemberdayaan dan pengelolaan usaha perkebunan yang di dalamnya juga termuat aturan tentang izin usaha perkebunan. Selain itu, pelaku usaha juga diatur dalam salah satu pasal, dimana sektor privat dan masyarakat dapat bekerjasama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri. UU tentang Perkebunan ini, kemudian diturunkan ke dalam beberapa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Beberapa permentan juga memuat aturan yang mendukung rantai nilai usaha kakao di daerah mulai dari input sarana produksi hingga pemasaran. Peraturan yang memuat input sarana produksi terdiri dari: Peraturan Menteri Pertanian No.130/Permentan/Sr.130/11/2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA 2015; dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.22/Menhut-li/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 31/Menhut-li/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, lebih jauh lagi ada aturan tentang Keputusan Menteri Pertanian No. 46/Kpts/PD.300/2015 Tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional.

**Permentan No. 130/Permentan/Sr.130/11/2014, mengatur tentang pasokan pupuk bersubsidi.** Pupuk bersubsidi ini diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk ini,

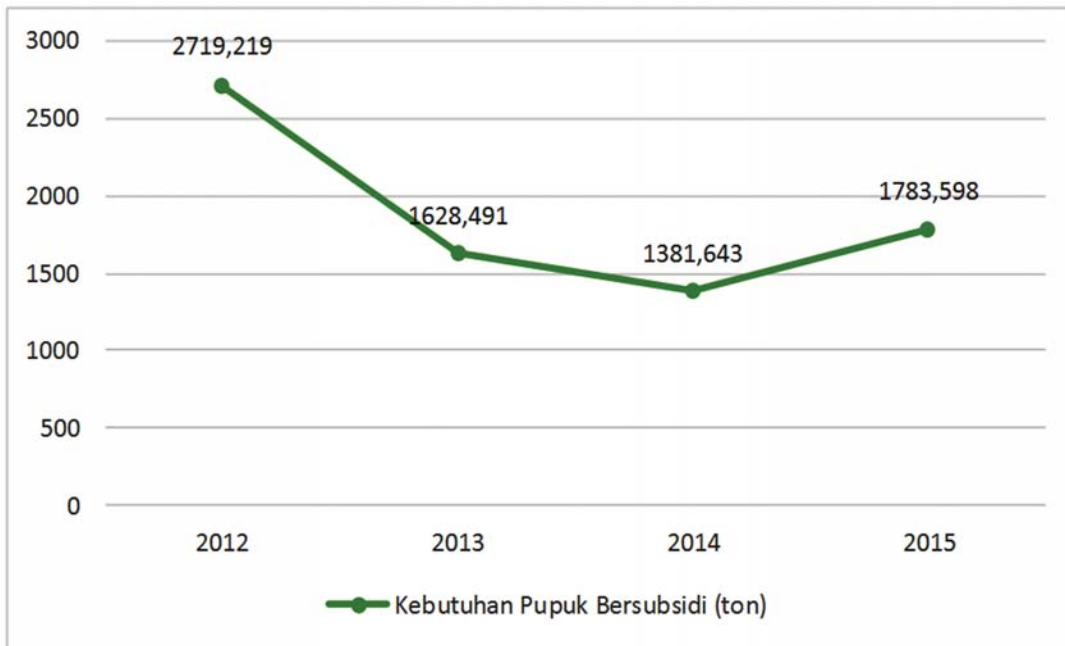
Gubernur diberikan mandat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) tentang jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran pupuk bulanan pada masing-masing kabupaten/kota. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ini digunakan dengan mempertimbangkan rekap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK disusun berdasarkan usulan dari kelompok tani. Penyusunan RDKK dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat. Dalam peraturan tersebut kapasitas pupuk bersubsidi untuk sektor perkebunan sebanyak 1.783,598 ton/ per tahun.

Permen tersebut menjadi salah satu perlindungan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, kondisi di lapangan berkata bahwa terjadi kelangkaan sarana produksi, salah satunya adalah pupuk. Dengan kapasitas pupuk yang tertulis dalam Permen, seharusnya kelangkaan tersebut dapat diminimalisir. Pada peraturan ini tidak dimungkinkan adanya monitoring dan evaluasi distribusi pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Kementan (2012-2015), kebutuhan pupuk sub-sektor perkebunan terjadi penurunan dari tahun 2012 (2.719,219).

**Permentan Nomor: P.22/Menhut-li/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 31/Menhut-li/2005, peraturan ini mengatur tentang pembukaan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan.** Dalam peraturan luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk budidaya perkebunan diberikan:

- a. Paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar, untuk satu perusahaan atau group perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya

Grafik 5.1 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Ton)



setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya.

- b. Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau group perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya.

Sebelum dilakukan konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, perlu untuk dilakukan evaluasi administrasi dan atau evaluasi lapangan terhadap proses pengurusan Hak Guna Usaha dan adanya aktivitas kegiatan fisik di lapangan.

**Kepmentan No. 46/Kpts/PD.300/2015, mengatur tentang kawasan perkebunan di tingkat nasional.** Dalam peraturan tersebut mengatur tentang beberapa kawasan di Indonesia yang dikhususkan untuk mengembangkan sektor perkebunan, salah satunya kakao.

Kabupaten Ende, menjadi salah satu dari 18 daerah yang menjadi kawasan perkebunan kakao. Adanya peraturan ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan tata ruang dan wilayah. Berikut adalah kabupaten yang termasuk dalam kawasan perkebunan kakao:

1. Kab. Pidie
2. Kab. Pidie Jaya
3. Kab. Pasaman
4. Kab. Pasaman Barat
5. Kab. Donggala
6. Kab. Parigi Mautong
7. Kab. Sigi
8. Kab. Luwu
9. Kab. Luwu Utara
10. Kab. Polewali Mandar
11. Kab. Mamuju
12. Kab. Konawe
13. Kab. Kolaka
14. Kab. Konawe Selatan
15. Kab. Kolaka Utara
16. Kab. Kolaka Timur
17. Kab. Sikka
18. **Kab. Ende**

Dari sisi perizinan usaha perkebunan, terdapat beberapa izin yang harus dipenuhi. Izin tersebut diatur dalam Permentan Nomor: 26/Permentan/Ot.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pada peraturan menteri ini berisi tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Izin yang harus diurus untuk memulai usaha perkebunan diantaranya adalah:

1. **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
2. **Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;
3. **Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
4. **Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B)** adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
5. **Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)** adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.

Syarat IUP-B dan IUP-P dapat dilihat pada Tabel 5.3 di halaman selanjutnya. Dalam peraturan ini juga disebutkan tentang kemitraan pengelolaan dan/atau kemitraan usaha. Kemitraan tersebut berdasarkan pada asas manfaat dan

berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Kemitraan ini dilakukan dengan tujuan pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Kemitraan usaha yang dimaksud dilakukan melalui pola:

- a. Penyediaan sarana produksi;
- b. Kerjasama produksi;
- c. Pengolahan dan pemasaran;
- d. Transportasi;
- e. Kerjasama operasional;
- f. Kepemilikan saham; dan/atau
- g. Kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

Selain izin usaha perkebunan, dalam peraturan ini juga memuat tentang perubahan luasan lahan, jenis tanaman dan/atau perubahan kapasitas pengolahan serta diversifikasi usaha. Persetujuan untuk perubahan luasan lahan, jenis tanaman, atau perubahan kapasitas pengolahan dan diversifikasi usaha diberikan kewenangannya kepada Bupati/Walikota/ Gubernur yang berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Sebagai sarana pendukung pengembangan usaha agribisnis kakao, tidak terlepas dari peran BP4K. Dimana tugas dari BP4K yang menerjunkan PPL untuk melakukan pendampingan kepada petani. Penguatan kelembagaan serta pembinaan dari internal petani dalam sebuah organisasi Kelompok Tani (Poktan) akan memudahkan mereka untuk mengakses sarana produksi bersubsidi dan juga sebagai sarana pertukaran informasi. Pendampingan dan pembinaan kelembagaan petani tertulis dalam Permentan Nomor 82/Permentan/Ot.140/8/2013.

Permentan Nomor 82/Permentan/Ot.140/8/2013, membahas tentang

Tabel 5.3 Syarat IUP-B dan IUP-P

IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya)	IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan)
<p>a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;</p> <p>b. Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>c. Surat keterangan domisili;</p> <p>d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);</p> <p>e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);</p> <p>f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;</p> <p>g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);</p> <p>h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;</p> <p>i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</p> <p>k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;</p> <p>l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan</p> <p>m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.</p>	<p>a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;</p> <p>b. Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>c. Surat keterangan domisili;</p> <p>d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;</p> <p>e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;</p> <p>f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;</p> <p>g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;</p> <p>h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;</p> <p>i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;</p> <p>j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.</p>

**pengembangan dan pembinaan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).** Terkait dengan prinsip, fungsi dan manfaat serta bentuk pembinaan yang dilakukan untuk mengintervensi kelompok tersebut. Selain berkaitan dengan pengembangan kelembagaan Poktan dan Gapoktan. Dalam peraturan ini juga menuliskan tahapan dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK). Rencana Definitif Kelompok (RDK) disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan usahatani kelompok, termasuk kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), dalam jangka waktu satu tahun. Selain berkaitan dengan pengembangan kelembagaan Poktan dan Gapoktan. Dalam peraturan ini juga menuliskan tahapan dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK). Rencana Definitif Kelompok (RDK) disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan usahatani kelompok, termasuk kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), dalam jangka waktu satu tahun.

Sedangkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Rencana ini disusun paling lambat 1 bulan sebelum jadwal tanam. RDKK juga digunakan untuk mendapatkan fasilitas pupuk bersubsidi. Namun, dalam mendapatkan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan peraturan, yaitu sesuai dengan luas lahan maksimal seluas dua hektar dan satu hektar bagi petambak serta hanya akan diberikan kepada setiap petani yang bergabung dalam poktan. Pengurus poktan diharapkan dapat memotivasi petani lainnya untuk bergabung dalam poktan serta bersama-sama menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan usahatani dengan menerapkan teknologi yang direkomendasikan diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi petani maupun aparat pembina dan pemangku

kepentingan lainnya dalam gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK termasuk RDKK Pupuk Bersubsidi. Kegiatan tersebut, diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani berkelompok secara berencana dengan azas musyawarah untuk menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran.

Supervisi pelaksanaan RDK dan RDKK adalah:

1. Pelaksanaan supervisi oleh pusat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengawalan dan pendampingan kegiatan penyuluhan ke daerah;
2. Supervisi dari provinsi dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan ke kabupaten/kota;
3. Supervisi dari kabupaten/kota ke kecamatan dilaksanakan pada awal dan akhir musim tanam/siklus usaha;
4. Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K berkewajiban melakukan supervisi kepada para penyuluh dalam memfasilitasi penyusunan dan pengusulan RDK/RDKK yang melekat dengan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan /BP3K;
5. Penyuluh pertanian berkewajiban untuk memfasilitasi penerapan teknologi sesuai dengan rekomendasi sebagai dasar perhitungan kebutuhan saprotan dalam RDK/RDKK.

Sistem Kerja LAKU yaitu pendekatan penyuluhan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya, yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani/kelompoktani (poktan) yang dilakukan secara terjadwal. Sistem kerja ini didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan.

Dari sisi rantai nilai pemasaran, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa standar biji kakao yang dapat diekspor serta untuk mendorong daya saing peningkatan ekspor biji kakao. Pemerintah menerbitkan Permentan Nomor 67/Permentan/ Ot.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu Dan Pemasaran Biji Kakao. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah biji kakao Indonesia, mendukung pengembangan industri berbahan baku kakao dalam negeri, memberikan perlindungan pada konsumen dari peredaran biji kakao yang tidak memenuhi persyaratan mutu.

Beberapa kegiatan pengelolaan dan produksi biji kakao dalam peraturan ini, berkaitan dengan:

- ✓ Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao yang selanjutnya disebut UFP-BK adalah unit usaha yang dibentuk oleh satu atau lebih Poktan atau Gapoktan atau Pelaku Usaha sebagai tempat kegiatan penanganan, pemrosesan, dan pemasaran Biji Kakao.
- ✓ Surat Tanda Pendaftaran yang selanjutnya disebut STP adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang menyelenggarakan fungsi perkebunan yang menyatakan bahwa UFP-BK telah terdaftar secara resmi.
- ✓ Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao yang selanjutnya disebut SKAL-BK adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh UFP-BK yang menerangkan asal Biji Kakao dan telah memenuhi persyaratan mutu sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan dan/atau peredaran Biji Kakao.
- ✓ Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disebut OKKP-P adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk

melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

- ✓ Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut OKKP-D adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
- ✓ Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao yang selanjutnya disebut SJM-BK adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh OKKP-D kepada UFP-BK yang telah mampu menerapkan sistem jaminan mutu.
- ✓ Surat Keterangan Kesesuaian Mutu yang selanjutnya disebut SKKM adalah dokumen yang terbitkan oleh OKKP-D yang menerangkan hasil penilaian kesesuaian mutu Biji Kakao terhadap persyaratan mutu Biji Kakao yang sudah ditentukan.

Peraturan ini membahas tentang UFP-BK yang berkaitan dengan kelembagaan, persyaratan mutu, penanganan, pemasaran, pembinaan dan pengawasan. Ruang lingkup tersebut dijabarkan melalui:

- a. Kelembagaan: UFP-BK dari sisi kelembagaan harus memiliki struktur organisasi, sarana dan prasarana kerja. Dalam menerbitkan SKAL-BK harus memiliki STP dan SJM-BK, jika tidak memiliki SJM-BK maka UFP-BK harus memiliki SKKM dan OKKP-D. Syarat kepengurusan beberapa sertifikat dan tanda bukti tersebut terdapat dalam peraturan ini.
- b. Persyaratan mutu dan penanganan: persyaratan biji kakao yang berasal dari dalam negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Serangga hidup	Tidak ada
2. Kadar air	Maksimal 7,5%
3. Kadar benda asing	Tidak ada
4. Kadar biji pecah	Maksimal 2%



5. Biji berbau asap dan/atau <i>hammy</i> dan/atau berbau asing	Tidak ada
6. Kadar biji berjamur	Maksimal 4%
7. Kadar biji <i>slaty</i>	Maksimal 20%
8. Kadar biji berserangga	Maksimal 2%
9. Kadar kotoran ( <i>waste</i> )	Maksimal 3%
10. Kadar biji berkecambah	Maksimal 3%

- c. Pemasaran: untuk mengedarkan biji kakao dapat melakukan kerjasama kemitraan usaha dengan industri pengolahan dan eksportir berdasarkan azas manfaat dan keberlanjutan yang saling menguntungkan yang dituangkan dalam kontrak/kerjasama perjanjian.
- d. Pembinaan dan pengawasan: dalam hal pembinaan UFP-BK dilakukan secara berjenjang oleh SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menyelenggarakan fungsi perkebunan, serta instansi pusat yang terkait. Pembinaan yang dimaksudkan meliputi pembinaan kelembagaan, penanganan pasca panen, penerapan sistem jaminan mutu serta pemasaran. UFP-BK melakukan pembinaan dan pengawasan internal kepada anggotanya yang menghasilkan biji kakao. Berbeda dengan pembinaan, pengawasan dilakukan OKKP-D. OKKP-D wajib menyampaikan laporan perkembangan UFP-BK yang telah menerbitkan SKAL-BK kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P setiap 6 (enam) bulan sekali.

Berdasarkan peraturan tersebut, banyaknya dokumen yang harus disiapkan untuk mendirikan UFP-BK akan menjadi beban tersendiri bagi poktan atau gapoktan. Disisi lain, pendirian unit ini

menjadi salah satu pendorong pengelolaan biji kakao di daerah. Dalam hal, ini pemerintah sebagai aktor yang memiliki kewenangan, melalui kebijakan dapat membantu untuk mendorong pendirian UFP-BK. Peningkatan daya saing ekspor biji kakao olahan pemerintah membuat kebijakan tentang tarif bea keluar biji kakao. Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK.011/2010 tentang pengenaan bea keluar untuk biji kakao dan terhitung efektif sejak tanggal 1 April 2010 mengatur tentang penerapan jika harga biji kakao. Ketentuan harga tersebut terperinci sebagai berikut:

- ✓ < US\$ 2,000 per ton, maka Rp. 0,-
- ✓ Antara US\$ 2,000-US\$ 2,750 per ton, maka BK 5%
- ✓ Antara US\$ 2,750-US\$ 3,500 per ton, maka BK 10%
- ✓ > US\$ 3,500 per ton, maka BK 15%

Tujuan kebijakan pemerintah ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah ekspor biji kakao dan menjamin pasokan biji kakao untuk industri nasional, sehingga kebijakan ini diharapkan mendorong tumbuhnya industri pengolahan biji kakao nasional. Terkait dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor biji kakao, penerapan bea keluar akan mendorong pelaku ekonomi (baik petani, pedagang maupun eksportir) untuk mengolah biji kakao menjadi produk-produk olahan seperti *cocoa cake*, *cocoa butter* dan *cocoa powder* terlebih dahulu sebelum mengekspornya. Setiap upaya untuk mengolah biji kakao menjadi produk-produk olahan tentu akan meningkatkan nilai tambah dari biji kakao tersebut.

Namun, kondisi di lapangan ternyata berbeda, berdasarkan data dari Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menyebutkan bahwa dengan terbitnya Permenku tentang bea keluar biji kakao membuat ekspor biji kakao menjadi menurun. Penurunan ini merupakan efek dari penetapan harga bea masuk. Terhitung

sebelum peraturan ini diterbitkan ekspor biji kakao pada tahun 2009 sebesar 439.305 ton. Namun, setelah penerapan bea masuk, jumlah ekspor biji kakao tahun 2012 sebesar 120.000 ton. Jika dilihat kondisi produksi biji kakao dari tahun 2007-2012 produksi biji kakao Indonesia relatif stabil berkisar antara 459.000-545.000 ton. Berikut adalah grafik 5.2 tentang perbandingan produksi, biji kakao yang diekspor serta yang telah diolah.

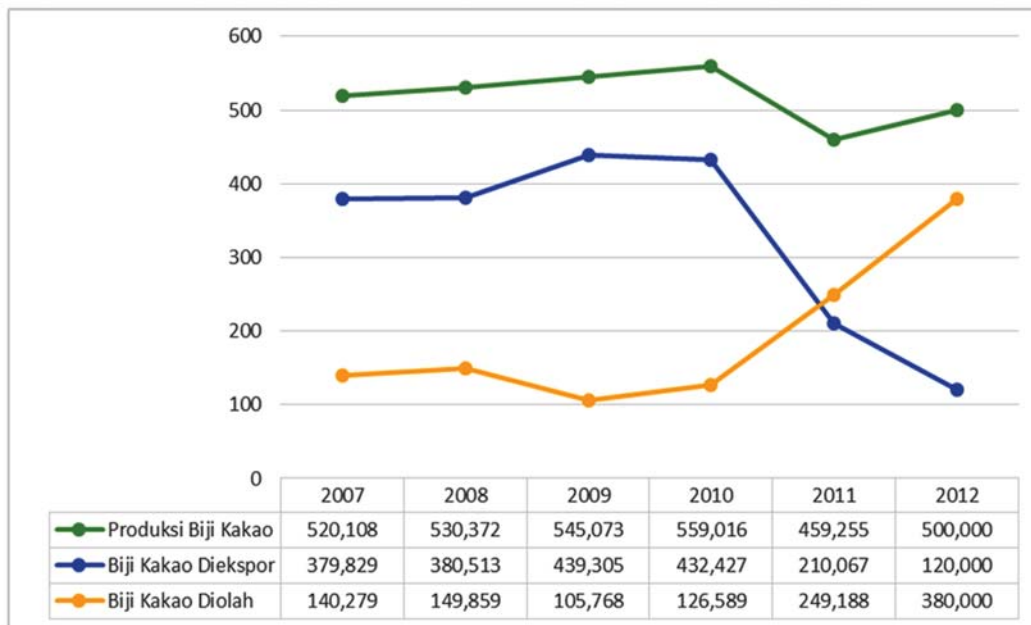
### 5.7 Analisis Strategi Pengembangan Kakao

Strategi pengembangan kakao di Ende dapat berfokus pada bertujuan pada peningkatan pendapatan petani. Strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas petani antara lain berupa pelatihan manajemen keuangan usaha. Hal ini sangat penting agar petani tidak lagi hanya memandang kakao sebagai usaha untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun juga sebagai unit usaha yang dapat mendatangkan keuntungan atau peningkatan pendapatan.

Strategi lainnya adalah menyediakan PPL dalam jumlah ideal. Tidak semua desa saat ini memiliki pendampingan dan didampingi satu penyuluh. Dari sisi kapasitas, pengetahuan dan kapasitas PPL mesti ditingkatkan khususnya terkait keahlian khusus berkaitan usaha kakao. Selain itu, perlu pula dijalin kemitraan dengan pihak-pihak lain dan para pemangku peran/kepentingan terkait dengan usaha kakao seperti Universitas, LSM, bahkan perusahaan kakao untuk melaksanakan peningkatan kapasitas PPL. Untuk itulah diperlukan, satu pola koordinasi, dan bahkan, kemitraan antar *stakeholder* bagi pengembangan usaha tani kakao.

Level intervensi pada aras penguatan kelembagaan (baik kelembagaan ekonomi maupun forum *stakeholders*) juga wajib dilakukan agar petani dapat memiliki kekuatan di pasar. UPH sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi, perlu mendapat pendampingan intensif dari Pemda. Pada dimensi substansi program, pendampingan tidak bisa hanya berkenan permodalan saja, tetapi juga

Grafik 5.2 Kondisi Ekspor Kakao Indonesia (Ton)



Sumber: AIKI, 2012

pada kemampuan mengakses pasar, membangun posisi tawar, dan sebagainya. Pendampingan tersebut membuat UPH dapat mandiri dan beroperasi sendiri tanpa tergantung terus-menerus kepada Pemda. Program dan anggaran Pemda yang berfokus pada pengembangan usaha kakao juga harus dioptimalkan. Pengoptimalan program pemda akan berdampak

langsung pada pengembangan usaha tani kakao secara teknis dan juga penguatan kelembagaan usaha tani melalui bantuan permodalan maupun peralatan bertani. Selain itu, koordinasi antar *stakeholder* juga dapat ditingkatkan dengan adanya program yang bersifat partisipatif dan melibatkan seluruh *stakeholder*. ■

Tabel 5.4 Fakta dan Masalah Usaha Kakao di Ende di setiap Rantai Nilai

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
<b>SARANA PRODUKSI</b>				
1. Toko komersial yang menyediakan pupuk dan saprodi lain berada kota kecamatan dan ibukota kabupaten. 2. Pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi melalui toko komersial.	1. Supply saprodi kebanyakan diambil dari Jawa. 2. Ketiadaan “jembatan” antara lembaga keuangan dan petani. 3. Kelemahan (rasa takut/ragu-ragu) petani untuk mengakses permodalan/kredit komersial untuk pengadaan saprodi. 3. Infrastruktur jalan buruk. 4. Managemen keuangan rumah tangga yang kurang baik atau pengelolaan keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan rumah tangga.	1. Dalam penyediaan saprodi, petani masih mengandalkan subsidi pemerintah dan program LSM. 2. Rendahnya kemampuan finansial petani untuk membeli pupuk dan saprodi. 3. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan stakeholder dalam penyediaan sarana produksi. 4. Terbatasnya supplier saprodi di Kab. Ende.	1. Mengadakan, memperbanyak, mendekatkan sumber saprodi kepada masyarakat. 2. Membentuk wadah kerja sama antara poktan, pemerintah, dan lembaga keuangan. 3. Pelatihan managemen keuangan rumah tangga. 4. Pelatihan pembuatan dan penggunaan pupuk organik. 5. Memperkuat DKED sebagai wadah kerja sama untuk menyediakan saprodi.	1. Pemprov 2. Pemkab 3. Lembaga keuangan 4. DKED 5. Petani/poktan

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
<b>BUDIDAYA/USAHA PERKEBUNAN</b>				
<p><b>Produksi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produktivitas kakao rendah baik secara kuantitas maupun kualitas.</li> <li>2. Kebun kakao kurang terawat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara pandang petani yang melihat kebun kakao sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, bukan tempat usaha.</li> <li>2. Management keuangan rumah tangga yang kurang baik.</li> <li>3. Kurangnya kesadaran petani untuk pengelolaan, merawat kebun dan pemupukan secara optimal.</li> <li>4. Belum banyak petani yang melakukan perawatan kebun secara baik (Good Agricultural Practicess-GAP).</li> <li>5. Hama dan penyakit yang menyerang buah kakao: HPT (busuk buah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknik pengendalian HPT, sanitasi, dan penanganan limbah belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan petani.</li> <li>2. Petani tidak ada/belum tahu sistem penggantian (rehabilitasi) yang tepat.</li> <li>3. Belum memakai teknik pemupukan yang tepat.</li> <li>4. Kurangnya pengetahuan petani untuk melakukan peremajaan dan perawatan kebun.</li> <li>5. Kekurangan sarana prasarana produksi dan modal usaha.</li> <li>6. Kurangnya koordinasi antarstakeholder kakao.</li> <li>7. Keterbatasan kapasitas penyuluh (jumlah dan kualitas)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelatihan GAP.</li> <li>2. Membentuk wadah kerja sama antara poktan, pemerintah, dan lembaga keuangan untuk menjamin ketersediaan modal usaha bagi petani.</li> <li>3. Pelatihan manajemen keuangan rumah tangga.</li> <li>4. Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS/sukarela/LSM)</li> <li>5. Optimalisasi koordinasi antarstakeholder kakao di bawah wadah DKED (Pemda, LSM, Poktan, Bank, Koperasi).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. BP3</li> <li>3. Dishutbun</li> <li>4. Dinas Koperasi</li> <li>5. Perbankan</li> <li>6. LSM</li> <li>7. Penyuluh</li> <li>8. Mosalaki</li> <li>9. Petani/Poktan</li> </ol>

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
<b>BUDIDAYA/USAHA PERKEBUNAN</b>				
<p><b>Sumber Daya Manusia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dan keterampilan petani masih terbatas dalam hal budidaya dan pengolahan hasil kakao.</li> <li>2. Keterbatasan kapasitas (kemampuan) dan jumlah tenaga penyuluh (PPL).</li> <li>3. Penguatan kapasitas petani lebih banyak dilakukan melalui program-program LSM dan Universitas yang ada di Ende dengan cakupan yang terbatas dan tingkat keberlanjutan sesuai dengan durasi program. Keterikatan pada struktur adat (mosalaki).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara pandang petani yang melihat kebun kakao sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, bukan tempat usaha.</li> <li>2. Kesadaran petani untuk memelihara kebun masih kurang.</li> <li>3. Budidaya kakao masih dilakukan secara tradisional, pengetahuan petani masih rendah dalam hal budi daya, sanitasi, fermentasi, pemasaran, dan kualitas biji kakao yang diminati pasar.</li> <li>4. Ketergantungan petani untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah/ Pemda.</li> <li>5. Kesadaran membentuk poktan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan program</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi kelompok belum optimal.</li> <li>2. Program pendampingan petani yang dilakukan oleh Distanbun dan BKP3 dilakukan sebatas ketersediaan anggaran dan ketersediaan jumlah dan kapasitas PPL yang ada.</li> <li>3. PPL yang tersedia bersifat polivalen/ umum dan ketersediaan anggaran.</li> <li>4. Kurangnya koordinasi di antara SKPD dalam melaksanakan program dan optimalisasi sumber daya yang ada.</li> <li>5. Memprioritaskan acara adat daripada merawat kebun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan organisasi bagi petani.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas penyuluh spesialis kakao.</li> <li>3. Merencanakan kegiatan pendampingan penyuluh ke daerah sentra kakao.</li> <li>4. Meningkatkan anggaran dan koordinasi program-program penyuluhan.</li> <li>5. Meningkatkan koordinasi di antara SKPD dalam melaksanakan program dan optimalisasi sumber daya yang ada.</li> <li>6. Peningkatan kerja sama dengan lembaga adat (mosalaki).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. BP3</li> <li>3. Dishutbun</li> <li>4. Dinas Koperasi</li> <li>5. Perbankan</li> <li>6. LSM</li> <li>7. Petani/ poktan</li> <li>8. Mosalaki</li> </ol>

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
<b>PENGELOLAAN PASCA PANEN</b>				
<p>1. Pengolahan pasca panen, seperti pengeringan dilakukan secara tradisional didepan rumah/aspal tanpa memperhatikan faktor sanitasi. Idealnya diperlukan adanya lantai jemur.</p> <p>2. Kebanyakan petani hanya mengeringkan 1 hari kemudian langsung jual ke pedagang desa.</p> <p>3. Baru sebagian kecil kelompok tani yang menggunakan teknologi untuk pengeringan contohnya Warikoko</p>	<p>1. UPH tidak berjalan secara maksimal karena keterbatasan teknologi dan anggaran --&gt; Anggaran untuk mengoperasikan alat pengeringan kakao .</p> <p>2. Kendala pembuatan Warikoko, adalah mahalnya plastic UV yang digunakan sebagai penutup.</p>	<p>1. Teknologi pengeringan masih sederhana.</p> <p>2. Petani memerlukan uang tunai (cash money) segera untuk memenuhi kebutuhan hidup.</p> <p>3. Tidak melakukan fermentasi karena makan waktu dan tidak ada insentif harga.</p> <p>4. Organisasi dan manfaat kelompok belum dipahami.</p> <p>5. Kurangnya pendampingan dan penyuluhan dari Pemda.</p>	<p>1. Penguatan kapasitas dan kuantitas PPL untuk mendampingi petani.</p> <p>2. Penguatan permodalan petani melalui kerjasama dengan perbankan.</p> <p>3. Penguatan Unit Pengolahan Hasil (UPH) sebagai salah satu kelembagaan pengolah, termasuk penguatan permodalan.</p>	<p>1. Pemda</p> <p>2. LSM</p> <p>3. DKED</p> <p>4. Penyuluh</p> <p>5. Perbankan</p> <p>6. Koperasi</p> <p>7. UPH Petani/poktan</p>
<b>PEMASARAN DAN HARGA JUAL</b>				
<p>1. Harga kakao fluktuatif mengikuti harga bursa komoditi New York.</p> <p>2. Petani lebih suka menjual langsung kepada pedagang desa, meskipun harga rendah karena dorongan kebutuhan.</p>	<p>1. Posisi tawar petani dalam menentukan harga jual kakao sangat rendah. Ada kecenderungan pedagang pengumpul biasanya mem-permainkan harga.</p> <p>2. Akses petani untuk mendapatkan informasi harga sangat terbatas.</p>	<p>1. Manfaat dari adanya UPH belum dipahami.</p> <p>2. Kurangnya insentif bagi petani untuk melakukan pengelolaan biji kakao lebih baik.</p>	<p>1. Memperkuat permodalan UPH untuk membeli hasil panen petani.</p> <p>2. Membuka akses pasar yang lebih luas kepada petani/kelembagaan kelompok tani.</p> <p>3. Memberikan pendampingan kepada petani untuk 'berhadapan' dengan eksportir.</p>	<p>1. Pemda</p> <p>2. Pedagang</p> <p>3. Koperasi</p> <p>4. LSM</p> <p>5. Petani/poktan/Gapoktan</p>

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
<b>PEMASARAN DAN HARGA JUAL</b>				
<p>3. Tingkat pengetahuan petani akan kualitas biji kakao yang sesuai dengan standar / kebutuhan pasar masih rendah.</p> <p>4. Pasar Kakao berada di luar Ende (terdekat di Maumere-Sikka)</p>	<p>3. Volume yang dihasilkan individu petani masih sedikit, sehingga tidak mungkin bisa langsung akses kepada pedagang besar.</p> <p>4. Kualitas biji kakao yang dihasilkan (paca panen) masih rendah sehingga harga jual juga rendah.</p> <p>5. Pedagang pengepul datang tiap pagi dan sore, sehingga banyak petani yang tertarik untuk jual langsung di tempat.</p> <p>6. UPH tidak berjalan optimal dalam rantai pemasaran. Seharusnya dalam fermentasi dan pengeringan bersama pedagang / kelompok tani, perlu peran UPH dalam membeli kakao dalam kondisi basah.</p> <p>7. Sebaran daerah tanaman kakao yang sangat luas sehingga luasan kepemilikan lahan yang sempit sehingga produksinya kecil.</p>	<p>3. Tidak ada mekanisme pengaman ekonomi untuk menjamin kebutuhan hidup petani.</p> <p>4. Kurangnya dukungan / keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan serta pembangunan Pasar Kakao.</p>	<p>4. Memperkuat infrastruktur, contohnya jalan, dari dan ke sentra produksi untuk mendukung pemasaran.</p> <p>5. Mengatur tata niaga kakao.</p> <p>6. Optimalisasi koordinasi antarstakeholder kakao di bawah wadah DKED (Pemda, LSM, Poktan, Bank, Koperasi).</p> <p>7. Membentuk BUMD untuk pemasaran kakao.</p> <p>8. Mengintervensi stakeholder industri kakao di luar Ende.</p>	





## 6. Penutup

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis rantai nilai, masalah utama pengembangan kakao di Kabupaten Ende adalah lemahnya sinergitas jejaring dan simbiosis mutualisme di antara *stakeholder* kakao maupun belum optimalnya program dan anggaran pengembangan usaha kakao. Selain itu, penelitian ini menggambarkan permasalahan yang usaha tani kakao, diantaranya:

- 1) Tingkat SDM petani masih rendah. Petani masih kurang memiliki pemahaman usaha kakao sebagai satu usaha yang menguntungkan. Hal ini juga berdampak pada pengelolaan keuangan usaha kakao yang masih bercampur dengan keuangan keluarga. Dengan tidak adanya pengelolaan atau manajemen keuangan yang baik, maka petani tidak memiliki kemampuan permodalan yang baik untuk menjalankan dan merawat usaha perkebunan kakao.
- 2) Petani masih ada yang belum melakukan pengolahan biji kakao secara baik. Hal ini mengakibatkan petani tidak menerima harga yang baik. Dampaknya adalah petani tidak mendapatkan pendapatan yang mampu menutupi kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan berusaha tani. Sehingga pada akhirnya, masih ada petani yang kemudian melakukan jual beli dengan sistem ijon.
- 3) Tata niaga kakao di Ende didominasi oleh pedagang pengepul tingkat desa dan kecamatan. Hal ini mempengaruhi harga jual kakao di tingkat petani, karena pedagang pengepul tingkat desa maupun kecamatan cenderung membeli biji kakao dengan kualitas asalan. Sebagian petani juga menjual biji kakao dengan kualitas asalan karena untuk menutupi kebutuhan petani baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan kebun. Kualitas infrastruktur jalan yang kurang baik, juga semakin memperkuat dominasi pedagang pengepul tingkat desa.
- 4) Akses langsung kepada perusahaan pengolah (Prosesor) juga masih minim. Umumnya petani langsung menjual kepada pedagang pengepul tingkat desa dan kecamatan. Hal ini mengakibatkan petani tidak mendapatkan harga yang baik.
- 5) Keberadaan penyuluh lapangan belum memenuhi jumlah ideal yaitu satu penyuluh per desa. Selain itu, kemampuan penyuluh juga belum fokus kepada teknis kakao, hal ini diakibatkan kemampuan penyuluh yang masih polivalent. Permasalahan penyuluhan lainnya adalah kurangnya dukungan anggaran (fiskal) sehingga kegiatan penyuluhan tidak berjalan optimal. Selain itu, program peningkatan kapasitas penyuluh juga tidak fokus kepada kakao.
- 6) Keberadaan Mosalaki juga mempengaruhi pola budidaya tanaman kakao. Hal ini dikarenakan peran Mosalaki dalam pembagian lahan dan penentuan tanaman yang akan ditanam oleh petani.
- 7) Lemahnya koordinasi antar stakeholder. Lemahnya koordinasi ini mengakibatkan program-program penguatan petani maupun pengembangan usaha tani kakao menjadi tidak fokus dan terarah. Terkadang terdapat juga tumpang tindih program untuk satu lokasi yang sama

## 6.2 Usulan Tindak Lanjut

- 1) Pengoptimalan peran Tim Ekonomi Daerah Kabupaten Ende. Tim ini berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar-SKPD maupun dengan pihak lain di luar Pemda yang bergerak untuk peningkatan usaha kakao. Hal ini diperlukan agar program-program peningkatan usaha kakao dapat berjalan dengan fokus dan terarah.
- 2) Perlu diadakan penguatan kapasitas petani termasuk dalam meningkatkan pemahaman mengenai usaha kakao yang dapat menguntungkan. Selain itu juga, perlu dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan bagi petani. Dengan pelatihan pengelolaan keuangan tersebut, petani dapat memilah dan menjaga kestabilan keuangan untuk usaha tani kakao.
- 3) Penguatan petani dalam bentuk pelatihan tentang pengolahan hasil biji kakao dan pemasarannya juga perlu dilakukan. Hal ini sangat penting agar petani mampu melakukan pengolahan dan dapat menjual biji kakao berkualitas baik yang berdampak pada peningkatan pendapatan.
- 4) Perlu pelibatan Mosalaki dalam program-program terkait pengembangan usaha kakao, khususnya di daerah-daerah yang pengaruh Mosalaki masih kuat.
- 5) Perlu peningkatan dukungan fiskal untuk penyuluh untuk mendukung kegiatan penyuluhan di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan juga peningkatan kualitas infrastruktur khususnya jalan dari dan ke sentra produksi kakao. Peningkatan infrastruktur jalan ini dapat mendukung pelaksanaan penyuluhan maupun pemasaran biji kakao dari sentra produksi.
- 6) Perlu dilakukan penguatan kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan). Penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan usaha maupun peningkatan akses kredit. Selain itu, Poktan/Gapoktan juga dapat menjadi “jembatan” bagi pihak perbankan dalam mendapatkan akses kredit.
- 7) Perlu peningkatan peran dari Unit Pengolah Hasil (UPH) untuk menerima hasil biji kakao dari petani. Dengan adanya peran UPH ini diharapkan juga dapat mengurangi dominasi pedagang pengepul tingkat desa dan kecamatan dalam rantai pemasaran kakao di Ende. Untuk mendukung peningkatan peran tersebut, juga diperlukan penguatan dari sisi modal UPH.
- 8) Perlu peningkatan akses pasar bagi para petani, dalam bentuk mempertemukan petani ataupun Poktan/Gapoktan dengan perusahaan pengolah biji kakao (prosesor) maupun eksportir. Pertemuan ini setidaknya akan memotong jalur pemasaran dan dapat berdampak pada peningkatan harga jual yang diterima oleh petani. ■

# Daftar Pustaka

\_\_\_\_\_ *The Local Economic and Employment Development Programme*, OECD, 2004

*Igusa, Kunio. Globalization in Asia and Local Revitalization Efforts: A View from One Village One Product (OVOP) Movement in Oita, Jepang, TT.*

Saragih, Jeff Rudianto. *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis Pertanian*. Pustaka Pelajar. 2014.

KPPOD, “Kebutuhan Pengembangan Usaha Kakao dengan Pendekatan Rantai Nilai dan Evaluasi Gerakan Nasional Peningkatan dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO): Studi Kasus Kabupaten Sikka, NTT. Jakarta, 2013.

Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Ende. “Profil Komoditi Unggulan Perkebunan Kabupaten Ende: Komoditi Kakao”. Ende. 2013

Yayasan Tananua. “Studi Rantai Pemasaran Kakao di Kabupaten Ende-Flores. Ende. 2013.

Helmy, irfan. 2014. Peranan PLUT dalam Program One Village One Product. Diakses melalui <http://plut.or.id/berita/detil/99> pada tanggal 24 November 2015

Pemerintah Kabupaten Ende. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende 2014-2019*.

Statistik Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ende 2014

Permentan No. 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Permendagri No.9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan







**Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980  
Telp.: (021) 83780642/53, Fax.: (021) 83780643, Website: [www.kppod.org](http://www.kppod.org), Email: [kppod@kppod.org](mailto:kppod@kppod.org), Facebook: kppod